



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA
KOMISI IV DPR RI**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Dengan : Menteri Kelautan dan Perikanan RI
Hari, Tanggal : Senin, 23 Agustus 2021
Waktu : Pukul 10.10 s.d. 14.30 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Gedung Nusantara (KK-IV)
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta
- Ketua Rapat : SUDIN, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
Acara : 1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2020;
2. Evaluasi Anggaran Tahun 2021;
3. RKA K/L Tahun 2022 (Hasil Pembahasan secara Tertulis Kepada Badan Anggaran Untuk Disinkronisasi);
4. Usulan Program-Program yang akan Didanai oleh DAK Berdasarkan Kriteria Teknis dari Komisi; dan
5. Isu-Isu Aktual Lainnya.
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Tommy
Hadir : A. Anggota DPR RI:
25 dari 54 orang Anggota Komisi IV dengan rincian:
1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP)
3 dari 11 orang Anggota
 1. Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI
 2. Riezky Aprilia, S.H., M.H.
 3. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
 2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)
4 Dari 8 orang Anggota
 1. H. Dedi Mulyadi, S.H./Wakil Ketua
 2. Ichsan Firdaus
 3. Budhy Setiawan
 4. Alien Mus
 3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-GERINDRA)
3 dari 7 orang Anggota
 1. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari Dess., M.Sc.
 2. Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
 3. Dr. Azikin Solthan, M.Si.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrasi (F-NasDem)
3 dari 6 orang Anggota
 1. Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si./Wakil Ketua
 2. H. Sulaeman L. Hamzah
 3. Yessy Melani, S.E.
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)
2 dari 6 orang Anggota
 1. Anggia Erma Rini, M.K.M./Wakil Ketua
 5. Edward Tanur, S.H.
6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)
4 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. Suhardi Duka, M.M.
 2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
 3. Hj. Nur'aeni, S.Sos, M.Si.
 4. Muslim, S.Hi., M.M.
7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)
4 dari 5 orang Anggota
 1. drh. H. Slamet
 2. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
 3. H. Johan Rosihan, S.T.
 4. Drs. Hamid Noor Yasin, M.M.
8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)
1 dari 4 orang Anggota
 1. Haerudin, S.Ag., M.H.
2. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)
0 dari 2 orang Anggota

B. Undangan:

1. Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan);
2. Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum. (Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);
3. Dr. Muhammad Yusuf. S.H., M.M. (Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);
4. Dr. Ir. Muhammad Zaini Hanafi, M.Si. (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan);
5. Dr. TB Haeru Rahayu (Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan);
6. Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc. (Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan);
7. Ir. Artati Widiarti, M.A. (Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);

8. Laksma TNI Adin Nurawaluddin, M.Han. (Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
9. Lily Apriliya Pregiwati (Kuasa Plt. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
10. Hari Maryadi (Kuasa Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
11. Fatah Setiawan Topobroto Direktur Utama PT Perikanan Indonesia (Persero);
12. Sigit Muhartono Direktur Utama PT Perikanan Nusantara (Persero); dan
13. Arif Haendra Kuasa Direktur Utama PT Garam (Persero).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Yang terhormat Direktur Utama Perikanan Indonesia,
Yang terhormat Direktur Perikanan Nusantara,
Yang terhormat Direktur Utama Garam dalam hal ini diwakili dengan surat kuasa.

Mengawali rapat hari ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Kerja hari ini dalam keadaan sehat.

Sesuai jadwal rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Bamus pada tanggal 13 Juli 2021 dan keputusan Rapat Internal Komisi IV DPR RI tanggal 18 Agustus 2021. Pada hari ini Senin tanggal 23 Agustus 2021, Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam rangka membahas:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2020;
2. Evaluasi Anggaran Tahun 2021;
3. RKA K/L Tahun 2022;
4. Usulan Program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi; dan
5. Isu-isu aktual lainnya.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 Ayat (1) Tatib Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Rapat Kerja ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.10 WIB)

Rapat Kerja ini kita mulai pada pukul 10.10 WIB dan akan diakhiri pada pukul 14.10 WIB. Apabila memang tidak ada masalah-masalah yang krusial lebih cepat lebih baik, karena ini adalah perintah dari Pimpinan DPR RI agar rapat jangan terlalu lama di dalam ruangan. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tentang Tata Tertib atau atas kesepakatan bersama.

1. Pengantar Ketua rapat;
2. Penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan;
3. Tanggapan Komisi IV DPR RI;
4. Jawaban Menteri Kelautan dan Perikanan;
5. Kesimpulan Rapat;
6. Penutup.

Apakah acara ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Sebagaimana kita ketahui tata cara pelaksanaan tugas komisi dalam bidang anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Ayat (2) tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, antara lain mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN. Selanjutnya pada Pasal 173 Ayat (5) disebutkan bahwa Badan Anggaran melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN salah satunya dengan mempertimbangkan putusan Rapat Kerja Komisi. Saya tegaskan lagi mempertimbangkan keputusan Rapat Kerja Komisi dengan Pemerintah.

Terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN beserta nota keuangan, berdasarkan ketentuan Pasal 170 Ayat (1) Komisi melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah untuk membahas alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Kementerian/Lembaga dan hasil pembahasan akan disampaikan kepada Badan Anggaran secara tertulis.

Perlu kami sampaikan pelaksanaan Rapat Kerja hari ini adalah berdasarkan surat Badan Anggaran AG/09356/DPR RI/VII/2021, tanggal 13 Juli 2021 mengenai penyampaian rancangan jadwal pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2020 dan rancangan jadwal pembahasan RUU tentang APBN 2022, serta surat Badan Anggaran AG/09710/DPR RI/VII/2021, tanggal 28 Juli 2021 mengenai penyampaian perubahan anggaran jadwal pembahasan RUU APBN 2022.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintah. Melihat laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2020 untuk raealisasi belanja negara bersihnya sebesar Rp4,80 triliun atau mencapai 91,27% dari alokasi anggaran setelah revisi sebesar Rp5,26 triliun. Artinya dana yang tidak bisa dimanfaatkan sebesar Rp460 miliar, cukup besar sekali ini hampir setengah triliun yang tidak bisa diserap ini. Seharusnya waktu itu kalau dipakai untuk pembagian bioflok, untuk PEN yang cukup lumayan besar.

Hal ini menjadi catatan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berbenah diri dalam memanfaatkan alokasi pendanaan yang kurang optimal selama ini, misalnya program kegiatan Anggaran Belanja Tambahan 2020 yang sebagian besar mengalami gagal bayar kepada kelompok masyarakat, padahal sudah lolos verifikasi sudah terbit surat keputusan. Namun, bantuan tidak kunjung hadi ke masyarakat yang membutuhkan. Kegagalan ini dipandang mengecewakan sekali karena menurunkan tingkat kepercayaan rakyat di basis daerah pemilihan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, khususnya Anggota Komisi IV DPR RI yang telah membangun komunikasi dengan baik selama ini, namun berakhir pupus harapan.

Pengalaman pahit tersebut, harus dijadikan bahan evaluasi KKP di depan. Dan mohon jangan sampai terulang kembali di tahun 2021 dengan alasan adanya reconfusing dan lain sebagainya, karena hal tersebut dapat mencederai kembali rapat yang telah menjadi komitmen KKP untuk membantu mengurangi kesulitan beban fisik di masyarakat yang sudah menjerit.

Untuk itu, dalam rangka antisipasi gagalnya Pemerintah di tahun 2020, Komisi IV DPR RI meminta penjelasan realisasi anggaran KKP hingga Agustus 2021 beserta progress bantuan Pemerintah yang telah dan yang belum diimplementasikan kepada masyarakat. Mulai dari pagu awal KKP sebesar Rp6,65 triliun guna mengevaluasi program dan kegiatan direncanakan apakah terlaksana dengan baik atau tidak. Dan keberpihakan kepada masyarakat kelautan dan perikanan yang kita cintai dan kita sayangi di masa sulit perekonomian dan masa pandemi covid-19 yang tidak kunjung reda. Selain itu meningkatkan opini BPK terhadap KKP dari penilaian Wajar Dengan Pengecualian menjadi Wajar Tanpa Pengecualian.

Jangan sampai seperti periode-periode yang lalu disclaimer 3 kali, saya tidak tahu sebabnya apa. Apakah pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III tidak professional atau pemimpinnya yang kurang professional. Sementara dalam menghadapi tantangan 2022, KKP wajib melakukan terobosan baru dalam memberikan pola system kinerjanya secara konkrit, seperti menyelesaikan berbagai Juknis bantuan Pemerintah tahun 2022 atau tahun 2021 dilanjutkan segera melakukan realisasi kepada rakyat agar 2022 bantuan Pemerintah sudah dapat didistribusi dengan baik.

Harapan ini tentunya membutuhkan komitmen bersama diantara KKP dan Komisi IV DPR RI agar pertumbuhan ekonomi meningkat kembali.

Sebagaimana catatan BPS bahwa ekonomi Indonesia triwulan II tahun 2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,31% dan untuk perikanan mengalami pertumbuhan sebesar 9,69% jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2020.

Adapun kriteria teknis Dana Alokasi Khusus 2022 berdasarkan provinsi/kabupaten, Komisi IV DPR RI ingin meminta penjelasan kepada KKP sejauhmana konsep menu yang sudah dirancang dan juga sejauhmana proses penanganan isu-isu aktual di Indonesia yang sedang berkembang seperti ini.

Satu, terdapat 199 kota pesisir Indonesia bakal terkena banjir rob tahun 2050, di mana 118 ribu hektar wilayah akan terendam air. Dan 8,6 juta warga terkena dampak yang diperkirakan mencapai kerugian 1.576. Data ini kami rilis dari media Kompas. Dan bagaimana antisipasi KKP terhadap hal ini.

Kedua, 13 warga Indonesia menjadi ABK ikan Cina telah terdampar diperaian Somalia sekitar 8 bulan. Di mana kapalnya terisolir atau jauh dari Ibu Kota Mogadisu. Sejauhmana tingkat kordinasi dan kerja sama terhadap instansi-instansi internasional dalam upaya penyelamatan mereka.

Ketiga, reforma agraria di pulau-pulau kecil dan pesisir. Bagaimana solusi perlindungan hak terhadap masyarakat khususnya pelaku utama kelautan dan perikanan, yakni nelayan pembudidaya ikan petambak dan lain-lain.

Empat, tanggapan terdapat anggaran sebagian masyarakat yang di lini bawah kegiatan Maluku lumbung ikan nasional merupakan proyek strategis nasional adalah proyek elit politik yang tidak bermanfaat bagi nelayan Maluku. Bagaimana upaya KKP menjawab anggapan tersebut.

Kelima, masih maraknya konflik nelayan Andon di beberapa daerah dan kendala perijinan kapal perikanan di atas 30 GT, serta pemanfaatan sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif. Sejauhmana tingkat fasilitas KKP meredupkan konflik nelayan Andon, kemudian sejauhmana KKP memberikan kemudahan ijin kapal perikanan di atas 30 GT. Didorong melakukan penangkapan di zona ekonomi eksklusif dalam rangka kebangkitan kelautan dan perikanan Indonesia.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Dengan demikian pengantar saya sampaikan, sebelum Menteri menyampaikan hal-hal saya sebutkan tadi, kita lihat negara Tiongkok jumlahnya 1,5 miliar bahkan cenderung mereka minim sekali impor bahan baku untuk pakan terutama sektor kelautan. Kita lihat sekian ratus kilo meter sepanjang laut di beberapa tempat, di Pucau, di mana, dan lain-lain. Mereka semua itu bertambak pakai rambah jaring apung, bahkan ikan laut yang ditangkap oleh nelayan Cina di Laut Cina sendiri tidak lebih dari 20%, lainnya semua budidaya. Bahkan negara-negara seperti India, Eropa, Amerika, kalah konsumsi ikannya, kenapa? Karena harganya murah sekali, sangat murah dan sangat dijangkau.

Ini kurang lebih prolog dari saya, selanjutnya saya persilakan Bapak Menteri memberikan tanggapannya. Tidak perlu terlalu panjang karena mungkin nanti kalau ada hal-hal yang masalah teknis dijelaskan oleh para Eselon I.

Silakan Bapak Menteri.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Bismillahirrahmanirahim.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya,
Om swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.*

Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI.

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mencurahkan rahmat-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan, untuk melaksanakan Rapat Kerja membahas agenda pokok yang tadi disampaikan oleh Pimpinan, yaitu:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2020;
2. Evaluasi Anggaran Tahun 2021;
3. RKA K/L Tahun 2022;
4. Dana Alokasi Khusus bidang kelautan dan perikanan tahun 2022; dan
5. Isu-isu aktual lainnya.

Bapak Pimpinan, Wakil Pimpinan, dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Selanjutnya kami sampaikan hasil laporan keuangan Pemerintah Pusat tahun 2020 dengan penjelasan sebagai berikut.

Yang pertama, laporan realisasi anggaran mendapatkan bersih sebesar Rp857,3 miliar atau mencapai 78,49% dari estimasi pendapatan LRA sebesar Rp1,09 triliun. Realisasi belanja bersih sebesar Rp4,8 triliun atau mencapai Rp91,20% dari alokasi anggaran setelah revisi sebesar Rp5,25 triliun.

Yang kedua, neraca. Nilai Aset sebesar Rp26,309 triliun, nilai kewajiban sebesar Rp19,28 miliar, dan nilai ekuitas sebesar Rp26,29 triliun. Yang ketiga, laporan operasional mendapatkan sebesar Rp846,24 miliar sedangkan beban sebesar Rp6,115 triliun, sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional senilai Rp5,269 triliun. Surplus atau defisit dari kegiatan operasional dan surplus dari pos-pos luar biasa masing-masing sebesar defisit Rp1,90 miliar. Dengan demikian entitas mengalami defisit LO sebesar Rp5,26 triliun.

Yang keempat, Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas awal pada 1 Januari 2020 sebesar Rp26,03 triliun ditambah defisit LO sebesar Rp5,26 triliun ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar Rp649,4 miliar dan transaksi antar entitas senilai Rp4,88 triliun, sehingga ekuitas akhir per 31 Desember 2020 sebesar Rp26,29 triliun.

Atas laporan keuangan KKP tahun 2020 tersebut, BPK RI menyampaikan opini Wajar Dengan Pengecualian. Hal ini disebabkan oleh adanya transaksi bernilai material yang mengganggu kewajaran penyajian tetapi tidak bersifat luas. Dalam hal ini KKP akan terus memperbaiki kualitas laporan keuangan dengan melakukan penyempurnaan beberapa hal yang memerlukan tindak lanjut dari beberapa hal.

Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Untuk pagu anggaran tahun 2021 dapat kami sampaikan bahwa pagu anggaran KKP telah mengalami refocusing dan realokasi sampai dengan tahap IV, sehingga pagu saat ini menjadi Rp4,75 triliun. Adapun rincian kegiatan pasca refocusing dan realokasi tahap IV kami sampaikan pada lampiran I. Sampai dengan 19 Agustus 2021 realisasi penyerapan anggaran KKP tahun 2021 telah mencapai Rp2,60 triliun atau sebesar 56,30%. Bila dengan *outstanding* kontrak realisasi mencapai 64,58%. Dalam hal ini kami akan terus memaksimalkan serapan anggaran hingga akhir tahun 2021.

Terkait rencana kerja dan anggaran KKP tahun 2022, kami laporkan bahwa berdasarkan surat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI tanggal 23 Juli 2021, KKP mendapatkan pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp6.115.967.397.000,- usulan pagu anggaran berdasarkan unit kerja Eselon I KKP sebagai berikut.

1. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebesar Rp758,86 miliar;
2. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebesar Rp1,14 triliun;
3. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp917,27 miliar;
4. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp383,09 miliar;
5. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp981,34 miliar;
6. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1,36 triliun;
7. Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan sebesar Rp498,36 miliar;
8. Sekretariat Jenderal sebesar Rp589,97 miliar; dan
9. Inspektorat Jenderal sebesar Rp87,42 miliar.

Untuk rancangan pagu anggaran KKP berdasarkan program adalah sebagai berikut.

1. Program pengelolaan perikanan dan kelautan sebesar Rp2,12 triliun;
2. Program nilai tambah dan daya saing industri sebesar Rp190,99 miliar;
3. Program kualitas lingkungan hidup sebesar Rp86,22 miliar;
4. Program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp273,7 miliar;
5. Program riset dan inovasi IPTEK sebesar Rp50,75 miliar; dan

6. Program dukungan manajemen sebesar Rp3,39 triliun.

Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan *highlight* rincian usulan rencana kerja KKP tahun 2022, sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan anggaran Rp768,87 miliar, antara lain untuk:
 - a. Penyiapan SDM sarana prasarana dan system dalam rangka pelaksanaan pemungutan PNBK pasca produksi;
 - b. Pemberdayaan nelayan dalam bentuk bantuan Pemerintah;
 - c. Pengelolaan penangkapan ikan terukur;
 - d. Pengembangan pelabuhan perikanan.
2. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dengan anggaran Rp1,143 triliun, antara lain untuk:
 - a. Revalidasi tambak udang;
 - b. Modeling kawasan budi daya udang terintegrasi;
 - c. Pembangunan kampung budi daya di pedalaman, pesisir, dan laut;
 - d. Pemberdayaan pembudidaya ikan dalam bentuk bantuan Pemerintah.
3. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan anggaran Rp917,276 miliar, antara lain:
 - a. Penguatan armada pengawasan dan peningkatan operasi pengawasan melalui operasional kapal pengawas dan pesawat patroli;
 - b. Pengawasan disturbing fishing;
 - c. Penguatan koordinasi;
 - d. Pengawasan lintas instansi terkait.
4. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dengan anggaran Rp383,09 miliar, antara lain untuk:
 - a. Peningkatan konsumsi ikan dalam negeri melalui kampanye gemar ikan di 34 provinsi;
 - b. Pembangunan pasar ikan, sentra kuliner, dan gudang tepung;
 - c. Pemberdayaan pengolah dan pemasar hasil perikanan dalam bentuk bantuan Pemerintah;
5. Direktorat Jenderal Perencanaan Ruang Laut dengan anggaran Rp381,94 miliar, antara lain untuk:
 - a. Penataan ruang laut;
 - b. Rehabilitasi kawasan ekosistem mangrove seluas 200 hektar;
 - c. Pengembangan usaha garam rakyat seluas 200 hektar terutama peningkatan kualitas garam rakyat, dan kreatifitas hasil garam rakyat;
 - d. Pengelolaan kawasan konservasi perairan;
 - e. Pemanfaatan jasa kelautan;
 - f. Pembangunan prasarana dan sarana Desa Wisata Bahari;
 - g. Pembangunan prasarana dan sarana pesisir dan pulau-pulau kecil;
6. Badan Riset Sumber Daya KP dengan anggaran Rp1,346 triliun, antara lain untuk:
 - a. Pendampingan program KP oleh 4.400 orang penyuluh perikanan;
 - b. Penyelenggaraan pelatihan masyarakat untuk 25 ribu orang;

- c. Penyelenggaraan pendidikan vokasi 8.535 orang peserta didik;
 - d. Kajian stok sumber daya ikan di 11 WPP dan 4 WTP perairan darat;
 - e. Riset dan inovasi pendukung Ditjen teknis.
7. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dengan anggaran Rp498,356 miliar, antara lain untuk:
 - a. Penerapan system jaminan mutu dalam implementasi kelola;
 - b. Penerapan system perkarantinaan;
 - c. Pengembangan laboratorium, referensi, dan akreditasi;
 - d. Pengawasan di wilayah perbatasan.
 8. Sekretariat Jenderal dengan anggaran Rp589,97 miliar, antara lain:
 - a. Pelayanan penyiapan produk hukum, SDM aparatur, dan organisasi keuangan, perencanaan;
 - b. Kerja sama antara lembaga;
 - c. Pengadaan barang dan jasa;
 - d. Kerja sama luar negeri;
 - e. Data statistik;
 - f. Analisis pemantauan sumber daya;
 - g. Pengelolaan dana kelola LPMUKP.
 9. Inspektorat Jenderal dengan anggaran Rp84,42 miliar, antara lain pengawasan akuntabilitas mitra Inspektorat I sampai V dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan

Pimpinan, Wakil Pimpinan, dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa mengingat masih banyaknya peran strategis KKP dalam agenda pembangunan nasional yang belum tertampung dalam pagu anggaran tahun 2022, serta untuk dapat melaksanakan kegiatan prioritas utamanya untuk kepentingan masyarakat dalam pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan, maka KKP mengusulkan pagu tambahan anggaran sebesar Rp8,043 triliun yang terdiri dari belanja operasional sebesar Rp236,61 miliar untuk pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran di pusat dan di daerah.

Kemudian yang kedua, belanja non operasional sebesar Rp7,806 triliun yang digunakan dalam rangka melaksanakan program prioritas nasional dan terobosan KKP. Maka usulan pagu definitive KKP tahun 2022 menjadi sebesar Rp14,16 triliun, adapun rincian kegiatan usulan tambahan pagu anggaran sebagaimana lampiran II bahan yang telah kami sampaikan. Yang pada intinya adalah untuk penguatan kehadiran Pemerintah di masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Untuk itu, kami mohon dukungan dari Komisi IV DPR RI. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam laporan ini.

Selanjutnya kami sampaikan Dana Alokasi Khusus bidang kelautan dan perikanan tahun 2022 dikelompokkan menjadi dua, yaitu DAK KP untuk provinsi dan DAK KP untuk kabupaten kota. Adapun kriteria teknis penilaian DAK bagi provinsi adalah:

1. Sentra produksi kelautan dan perikanan;
2. Pelabuhan perikanan yang masuk dalam rencana induk pelabuhan perikanan nasional dan status P3D;
3. Status penetapan kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil;
4. Kerawanan IUU fishing;
5. Provinsi perikanan dan kelautan bercirikan kepulauan;
6. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
7. Lokasi mayor project RPJMN 2020-2024.

Sedangkan kriteria teknis untuk kabupaten kota, antara lain:

1. Sentra produksi perikanan tangkap dan budi daya, serta produksi olahan perikanan;
2. Jumlah nelayan pembudidaya, pengolah, dan pemasar hasil perikanan;
3. Sentra kelautan dan perikanan terpadu.

Adapun menu DAK provinsi bidang KP tahun 2022, antara lain:

1. Pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
2. Sarana dan prasarana pengawasan konservasi;
3. Pembangunan proyek rehabilitasi unit perbenihan;
4. Sarana dan prasarana perdalaman.

Sedangkan untuk kabupaten kota adalah:

1. Pembangunan rehabilitasi unit perbenihan;
2. Sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil;
3. Sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil;
4. Rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Dapat kami sampaikan untuk tahun 2022 pagu indikatif DAK bidang KP untuk provinsi tahun 2022 sebesar Rp500 miliar dengan indikasi penerima 24 provinsi. Dan DAK bidang KP untuk kabupaten kota tahun 2022 sebesar Rp700 miliar.

Pada kesempatan ini kami mengusulkan adanya tambahan pagu alokasi DAK sebesar Rp1,8 triliun yang diusulkan untuk pendanaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil sebesar Rp0,5 triliun. Sarana dan prasarana pemberdayaan usaha budi daya ikan skala kecil utamanya untuk kampung budi daya berbasis kearifan lokal sebesar Rp1 triliun. Dan untuk reahabilitasi sarana dan prasarana pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan sebesar Rp200 miliar.

Demikian beberapa hal yang kami sampaikan pada kesempatan Rapat Kerja kali ini. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ketua, Bapak dan Ibu Wakil Ketua, serta seluruh Anggota Komisi IV DPR RI yang sangat besar kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Seluruh saran, masukan, dan rekomendasi Komisi IV DPR RI akan menjadi bahan acuan untuk perbaikan pelaksanaan program.

Terima kasih.

*Wabillahi Taufik Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om santi santi santi om.*

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Karena penugasan dari awal.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI yang saya banggakan,
Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan para pejabat Eselon I.

Terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Anggota Komisi IV DPR RI untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Kami persilakan almuqarom TA. Khalid, waktu 3 menit karena Pak Menteri ada Rakor hari ini.

F-GERINDRA (Ir.H. TA. KHALID, M.M.):

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sehat untuk kita semua.*

Terutama sekali kita bersyukur setelah sekian lama kita tidak bersua hari ini kita bisa bertemu kembali dalam melaksanakan tugas konstitusi kita di sini. Ijinkan mengingat dan menghematkan waktu sebagaimana permintaan Pimpinan bahwa 3 menit berpacu dan harus selesai dalam 3 menit.

Bapak Menteri, Bapak Ketua, beserta seluruh jajaran yang kami muliakan, tidak mungkin kami sebut satu per satu,
Anggota Dewan yang terhormat,
Bapak Sekjen Eselon I.

Ijinkan kami dari Fraksi Gerindra, saya dari Fraksi Gerindra hari ini dipercayakan oleh Kapoksi untuk menjadi juru bicara Fraksi Gerindra, di mana kami ada 7 orang di sini telah merangkum ada 13 point. Tapi mengingat waktu, maka ijinkan kami menyampaikan ringkasan saja.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi IV DPR RI yang kami banggakan,
Bapak Menteri, Bapak Sekjen, serta seluruh pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sehubungan sesuai dengan agenda rapat kita hari ini, pertama tentang laporan keuangan Pemerintah Pusat tahun anggaran 2020, kemudian evaluasi anggaran tahun 2021, kemudian tentang RKA K/L tahun 2022. Maka yang pertama, kami dari Fraksi Gerindra menyampaikan yang pertama *Alhamdulillah* karena sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua tadi kita pernah

disclaimer beberapa kali, tapi untuk tahun 2020 KKP sudah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Bersyukur ada perkembangan dari disclaimer, tapi sejojanya Pak Menteri target yang ingin kita capai menjadi WTP. Maka ini optimalisasi kita semua bagaimana ke depan KKP bisa meraih WTP. Tentu untuk mencapai WTP itu tidak cukup dengan retorika, tidak cukup dengan penempatan anggaran, tapi bagaimana kinerja kita dilapangan, kinerja kita dalam optimalisasi anggaran.

Kemudian pada kesempatan ini, saya ingin juga melihat karena selama ini apalagi dengan situasi kondisi negeri kita yang masih pandemi di mana refocusing terus terjadi, di mana harapan kami, dan malah saya juga beberapa kali telah menyampaikan di ruangan ini, harapan kita di tengah kondisi refocusing ini di mana LPMU ada kredit KUR itu harusnya bisa menjadi penopang dalam kondisi refocusing.

Tetapi faktanya yang kami dapatkan terutama di Dapil kami seolah-olah KUR tidak ada di Aceh. Maka ini mohon ini perhatian, malah beberapa waktu yang lalu Pak Sekjen, saya pernah menyampaikan di ruangan ini, malah ada yang telah diverifikasi, malah sudah dikomitekan 8 bulan yang lalu tidak banyak ada yang minta Rp60 juta, Rp80 juta tapi tidak ada realisasi. Ini nampaknya mohon maaf Pak Sekjen, segera dievaluasi ini. Seharusnya KUR ini bisa menjadi penopang di tengah refocusing.

Kemudian terkait refocusing, ini kemarin mungkin hampir semua kita Komisi IV DPR RI terkejut di saat adare refocusing yang berimbas pada bioflok. Semua kita di group, semua kita Anggota Komisi IV DPR RI terkejut. Dan kami minta kepada Bapak Ketua, mungkin ini sudah ada persetujuan Bapak Ketua, saya juga tidak tahu sehingga saya harus banyak diam.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Maksudnya persetujuan apa ini?

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Persetujuan refocusing hilangnya bioflok, mungkin.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Saya jelaskan di sini, tidak ada dari KKP konsultasi masalah refocusing dan tidak di DIPA pun saya tidak tanda tangan, karena tidak ada yang konsultasi dengan saya. Jadi saya minta teman-teman Anggota Komisi IV DPR RI jangan seuzon terhadap Pimpinan. Ini saya jelaskan saja supaya jelas, tidak ada DIPA yang saya tanda tangani setelah refocusing.

Terima kasih.

F-GERINDRA (Ir. H. T.A. KHALID, M.M.):

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sudah cukup jelas?

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Sudah cukup jelas, karena memang perlu kejelasan jangan kita curiga Pak Ketua ini. Kita semua curiga Pak Ketua ini seolah-olah sudah oke, ternyata belum.

Kemudian kami dari Fraksi Gerindra, semangat Pak Menteri bagaimana terjadi penambahan anggaran kami Fraksi Gerindra mendukung agar ke depan minimal kita bisa mendapatkan Rp8 triliun.

Kemudian menyangkut infrastruktur yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri. Pak Menteri, menyangkut dengan kedangkalan muara mungkin sejak saya di Komisi IV DPR RI ini telah menyampaikan ini mohon perhatian serius di tahun 2022, karena sehebat apapun bantuan kita kepada nelayan kalau mereka tidak bisa melaut inikan sangat merugikan. Ini pada tahun 2022 mohon perhatian Bapak Menteri KKP agar kedangkalan muara yang terjadi hampir di seluruh provinsi terutama di Aceh, ini kami minta perhatian serius ada penanganan.

Kemudian menyangkut dengan informasi dan laporan yang kami dapatkan tentang penangkapan bibit lobster di daerah unit resort reskrim Polrestabes Palembang. Ini nampaknya masih perlu optimalisasi kita pengawasan Pak Menteri, agar ini informasi yang kami dapat Rp11 miliar lebih penangkapan itu. Jadi jangan satu sisi kita sepakat untuk ekspor, di sisi lain penyelundupan, ini mohon perhatian kita serius.

Jadi memang pandemi masih melanda republik kita, kemudian refocusing tidak bisa kita elakkan, tetapi kami minta kepada Kementerian jangan asal refocusing tanpa kordinasi dengan Komisi IV DPR RI. Contoh kemarin bioflok, pihak kementerian, pihak KKP sudah turun ke masyarakat melakukan verifikasi, malah tim verifikasi menyuruh kelompok masyarakat yang tidak siap menerima ada malah dibenah, disuruh benah, ada lokasi yang ditimbun, ada lokasi yang cor agar bisa taruh bioflok, tiba-tiba hilang.

Ini malah bukan membantu masyarakat, malah menzolimi masyarakat ini. Kalau kita tidak turun, tidak ada kita janji bioflok mereka tidak rugi, dengan ada janji bioflok mereka telah menumbun tanah untuk ditempatkan bioflok tiba-tiba refocusing apalagi Pimpinan belum tahu. Kalau hanya di sini kita membahas anggaran ternyata waktu refocusing kita tidak dilibatkan ngapain kita bahas anggaran.

Saya pikir demikian, terima kasih.

*Wabillahi Taufik Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

KETUA RAPAT:

Ibu Endang, nanti atau.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar Ibu Kiki, biar beliau ngasihkan dulu ya.
Silakan Ibu Riezky.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Mengingat tadi yang disampaikan oleh Pimpinan, bahwa Pak Menteri akan ada Rakor agar berlaku sama dengan semua mitra yang lainnya, apabila ada rapat tolong disampaikan di forum ini undangan atau apanya. Karena berlaku sama waktu itu Pertanian demikian, LHK juga demikian.

KETUA RAPAT:

Setelah selesai dengan Komisi IV DPR RI.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Kalau memang ada undangan dan waktu terbatas lebih baik tunda saja rapatnya Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Lanjut, silakan Ibu Endang mau memperjelas nggak, materi lain. Oh iya, silakan.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS., M.Sc.):

Terima kasih Pak.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Rapat ini tidak bisa ditunda lagi, karena siklusnya tanggal 6 sudah harus diserahkan kepada Badan Anggaran, itu saja sampai selesai rapat. Bila Bapak Menteri mau Rakor ya silakan.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS., M.Sc.):

Saya boleh terus Pak?

KETUA RAPAT:

Ya silakan, 1 menit.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS., M.Sc.):

1 menit saja.

Pak Menteri, saya hanya mengingatkan kembali sudah saya tulis semuanya. Jadi nanti saya serahkan ada 7 Direktorat Jenderal yang kami kritisi yang sampai sekarang belum turun timnya untuk mengevaluasi apa yang saya kemukakan pada waktu yang lalu, diantaranya tentang kepemilikan tanah yang oleh TNI.

Terima kasih, itu saja Pak.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Pak Suhardi Duka.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan yang terhormat,
Yang saya hormati Pak Menteri bersama dengan pejabat Eselon I KKP.

Tahun 2020 mendapat penilaian WDP, ini turun dari 2019 yang WTP. Saya ingin penjelasan pada hal mana yang tidak mendapat penilaian dari BPK. Tadi dijelaskan ada transaksi yang disclaimer, transaksi yang mana kira-kira sehingga tidak menjadi WTP. Dijelaskan Pak Menteri, bahwa pendapatan dari KKP itu Rp857 miliar dengan asset Rp26 triliun, kalau ini perusahaan tidak berbanding dengan asset tapi inikan bukan perusahaan.

Kemudian selanjutnya realisasi tahun 2021 baru 64,58% saya kira ini perlu perhatian Bapak Menteri jangan terus-terus menyiapkan Silva yang begitu besar di lain sisi Bapak meminta untuk tambahan anggaran. Silvana besar tapi tambah anggaran diminta, saya kira tidak sinkron. Seharusnya bisa dibelanjakan 2021 ini sampai dengan 98% lagi berapa bulan. Jadi kalau ada Eselon I yang tidak bisa membelanjakan anggaran diganti saja saya kira, karena tidak pandai membelanjakan anggaran.

Selanjutnya refocusing, hasil kesepakatan Menteri Keuanga dengan Badan Anggaran bahwa yang difocusing itu adalah perjalanan dinas, belanja-belanja operasional, rapat-rapat, dan lain-lain yang tidak tersentuh langsung dengan kepentingan publik atau masyarakat. Saya melihat ini bahwa refocusingnya justru yang langsung ke masyarakat itu yang difocusing. Saya kira tidak sesuai dengan standar yang kita buat bersama dengan Menteri Keuangan di Badan Anggaran. Oleh karena itu, saya minta kepada Pak Menteri

dan jajaran Eselon I perlu fokus dalam memperbaiki atau membuat refocusing ini.

Terhadap Dapil 2021, pengadaan kapal CPCL-nya sudah siap, ini perikanan tangkap ya Pak? Sampai sekarang kapalnya tidak ada, ini juga mungkin direfocusing atau hanyut kapalnya ini. Saya melihat ini persoalan karena begitu juga eskavator ada dua unit yang diberikan kepada Sulawesi Barat. Saya sudah telepon bupatinya, bupatinya saya telepon, Bapak bupati saya CPCL-nya sampai sekarang juga tidak ada mungkin juga direfocusing.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Pak Suhardi lumayan ada CPCL-nya kita-kita malah baru dengar ada CPCL.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Jadi saya minta Pak, kita saling menjaga saya jaga Bapak, kita juga jaga mitra Pak, jangan mempermalukan kita. Masa mitranya dipermalukan sama bupati, pada akhirnya nanti bupatinya kita kunjungan kerja ke sana tidak mau lagi berhadapan dengan kita. Bukan karena kesalahan saya tapi kesalahan Bapak yang memberikan itu, ini bupati yang kita permalukan. Bupati juga yang sampaikan kepada kelompok nelayannya dan bupatinya juga malu, ya akhirnya malu berkelanjutan.

Tahun 2022 ini speedboat 124 unit, dibandingkan dengan kapal nelayan yang 5 GT 65 unit. Ini saya lebih melihat bahwa kepentingan nelayan daripada speedboat ini lebih besar kepentingan nelayan. Speedboat ini banyak diparkir saja di provinsi, banyak diparkir di kabupaten. Di lain sisi nelayan kekurangan kapal. Jadi saya minta anggaran speedboat dialihkan sebagian kalau perlu dialihkan semua kepada pengadaan kapal nelayan.

Selanjutnya KKP perlu lebih fokus untuk peningkatan produksi, ketersediaan SDM Nelayan. Saya kira SDM-nya ini perlu, kita kan sepakat bahwa SDM nelayan rendah, di mana anggaran SDM nelayan. Ya tadi ada Bimtek itu Rp200 miliar, saya support itu. Yang kedua, sarana tangkap dan budi daya, tentu ini peningkatan produksi ya di sini tempatnya. Kapal, alat tangkap, bibit, dan lain sebagainya di situ tempatnya, kalau kita ingin peningkatan produksi, kemudian perbaikan system pasar.

Kemudian selanjutnya masalah pergaraman, terus-terus kita impor garam, kapan kita bisa mandiri garam ini. di satu sisi kita negara kelautan, di lain sisi pula laut belum dibeli, terus-terus kita impor garam yang begitu besar. Ini perlu langkah-langkah yang lebih fokus sehingga ketergantungan kita terhadap impor garam dan juga impor-impor bahan lainnya seperti salmon, walaupun salmon tidak di Indonesia tapi barangkali ini juga jangan terlalu keluasan yang begitu luas. Di lain sisi mengurangi devisa kita.

Kawasan rumput laut saya dorong, begitu juga DAK untuk kabupaten perlu memperhatikan Dapil, sehingga ada nilai kita di Dapil kita. Saya kira ini

yang saya sampaikan. Dan yang terakhir juga saya sudah jawaban bahwa ternyata Pimpinan belum tanda tangan terhadap refocusing-refocusing ini. Kecurigaan kita pertama Pimpinan melakukan, tapi syukur saya support kepada Pimpinan yang tidak menandatangani refocusing-refocusing ini.

Terima kasih.

*Wallahu Muwafiq Ila Aqwamith Thariq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Kan kita sudah komitmen kolektif kolegial.
Silakan Pak Johan Rosihan, Pak Hermanto diterakhir.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan yang saya hormati, para Anggota Komisi IV DPR RI, Bapak Menteri beserta seluruh jajarannya.

Pertama, sebelum saya lanjut ke materi, saya menggarisbawahi pernyataan Bapak Ketua Komisi tadi bahwa beliau belum menandatangani refocusing ini.

KETUA RAPAT:

Seluruh Pimpinan Pak.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Iya, terima kasih karena saya tidak pernah curiga sama Pimpinan saya, tidak pernah saya Pimpinan, kecuali Pimpinan berlaku tidak adil.

Jadi Pak Ketua, kemudian saya bertanya terus untuk apa rapat kita ini, ini harus diperjelas posisinya apakah yang direfocusing tanpa persetujuan di Komisi itu berlaku dalam penyelenggaraannya atau kesepakatan kita. Nah, kalau misalnya kesepakatan kita maka refocusing yang sudah dilakukan oleh KKP secara tanda kutib "sepihak" itu harus kita legalkan pada hari ini. Itu Pak Ketua, yang pertama.

Yang kedua, saya mulai ke materinya. Saya menggarisbawahi pidato Bapak Jokowi, biar kita ini utuh ngelihatnya sampai atas di mana sih persoalan ini. Dalam pidato kenegaraan kemarin ada *statement* Pak Jokowi bilang bahwa "Pemerintah tetap mengembangkan sektor pangan untuk membangun kemandirian pangan". Anggaran Kelautan yang menggarap sektor pangan ini tidak lebih dari 1% anggaran APBN kita. Apa yang bisa kita harapkan untuk membangun kemandirian pangan terutama dari sektor kelautan. Karenanya apa yang diinginkan oleh Kementerian KP tentu saya mendukung kalau misalnya masih ada ruang atau mudah-mudahan dengan rapat kita ini, dengan

rekomendasi kita nanti ini membuat Pemerintah ini sadar bahwa ada potensi sumberdaya yang kita miliki di kelautan kita itu yang butuh dukungan anggaran Rp6 triliun anggaran untuk menggarap semua potensi kita kelautan kita menurut saya itu tidak masuk akal, sehingga jangan sampai saya memberikan penilaian misalnya pidato Pak Jokowi itu hanya *lip service* saja untuk membangun kemandirian pangan, karena Undang-Undang Cipta Kerja kita tidak bicara tentang kemandirian pangan, dia bicaranya soal ketersediaan pangan, karenanya impor menjadi sesuatu yang wajar-wajar saja menurut Pemerintah.

Nah, terus berikutnya adalah saya meminta kepada Menteri KKP untuk memberikan gambaran kepada kita itu proporsional anggaran kita itu yang menyentuh langsung masyarakat itu apa saja tolong disebutkan di forum ini Pak, biar kita tahu bahwa ini anggarannya, ini lokasinya, biar jangan ada yang kemudian mengajukan CPCL sementara yang lain tidak tahu bahwa ada pengajuan CPCL itu. Karena kondisi infrastruktur perikanan kelautan kita itu hampir sama di seluruh Indonesia, hampir samanya itu tidak terurus. Ada pendangkalan di pelabuhan-pelabuhan ikan kita, pelabuhan-pelabuhan ikan kita yang tidak diperbaiki kondisinya.

Saya mengingatkan Pak Menteri, punya 3 program terobosan, pertama soal peningkatan PNPB di sektor tangkap menjadi Rp12 triliun, fakta hari ini baru Rp600 miliar. Tolong berikan gambaran kepada kami langkah-langkah menuju kesana. Memang janji Pak Menteri 2024, tapi kan tidak bisa kita main *simsalabim* di sana Pak, 2022 peningkatannya berapa, 2023 berapa, baru kemudian nanti kita sampai finish pada tahun 2024.

Yang berikutnya saya melihat ketidak proposionalnya anggaran dalam penyusunan anggaran ini dari hulu ke hilir. Kita di hulu ada tangkap dan ada budidaya, itu tangkapnya Rp700 miliar, terus budidaya Rp1,1 triliun. Sementara di hilir di peningkatan daya saing cuma Rp300 miliar Pak, karenanya tidak heran kemudian ketika kita daya saing perikanan ekspor kita itu dengan negara tetangga itu kalah kita, walaupun volume ekspor kita tinggi tetapi daya saingnya itu kalah dibanding dengan Malaysia, Vietnam, dan lain sebagainya. Bagaimana anggaran kita daya saing di hilir itu Rp300 miliar di hulunya lebih besar. Nah, tolong dibuat proporsional ini Pak, sehingga kita memiliki daya saing yang hebat dibandingkan negara-negara tetangga.

Nah, berikutnya soal penggaraman lagi. Saya melanjutkan pertanyaan Bapak Suhardi Duka, bahwa sampai kapan sih kita impor garam dengan panjang laut kita yang begini. Dulu sudah pernah dijawab bahwa garam kita itu kurang asin, karena NaCl kurang kadarnya. Terus peran kita apa, apa peran kita untuk membuat garam kita itu sama asinnya dengan garam-garam dari luar negeri yang kita impor itu. Nah, ini yang saya minta agar kemudian anggaran-anggaran kita itu fokus, ini yang saya bilang *refocusing* agar kemudian kita betul-betul dengan anggaran yang kita punya itu apalagi nanti kalau misalnya 6 ditambah 8 misalnya, maka anggaran kita nanti hampir lebih dari Rp14 triliun. Nah, inikan harus diberikan gambaran kepada kita itu proporsionalnya bagaimana, *outcome*, dan lain sebagainya itu kemudian bisa kita gambarkan

sehingga nanti Komisi IV DPR RI bisa mendukung teman-teman di Banggar itu bisa mendukung apa yang menjadi keinginan dari Bapak Menteri itu.

Detailnya Pak Ketua, mohon maaf nanti kami dari PKS untuk menyerahkan secara tertulis kepada Menteri KKP.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya H. Sulaeman.

F-NasDem (H. SULAEMAN L. HAMZAH):

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati, Bapak Menteri, Bapak Sekjen, dan seluruh Eselon I yang saya banggakan.

Pertama, kita bersyukur bahwa hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat wal'afiat untuk melaksanakan pekerjaan rutin kita Rapat Kerja. Kita memiliki potensi ekonomi kelautan dan perikanan yang luar biasa, sehingga sektor kelautan dan perikanan harusnya menjadi sektor strategis yang mampu menjadi salah satu penggerak utama roda perekonomian nasional. Perencanaan yang matang serta dukungan anggaran yang tepat diharapkan dapat memaksimalkan potensi ekonomi pada sektor kelautan dan perikanan yang dikelola secara optimal dan berkelanjutan menuju kesejahteraan masyarakat.

Pada Rapat Kerja kali ini, Fraksi NasDem akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan materi sebagai berikut. Yang pertama, pertanggungjawaban anggaran 2020. Realisasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 yang mencapai 91,27% mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Direktorat Jenderal yang paling memberikan kontribusi terhadap rendahnya serapan anggaran KKP tahun 2020, yaitu Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 85,51% dan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya 80,21%. Tentunya hal tersebut menjadi catatan dan evaluasi memacu serapan anggaran tahun berjalan. Selain itu diperlukan upaya perbaikan pada permasalahan pelaporan keuangan yang menjadikan KKP hanya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian dari BPK. Fraksi Partai NasDem berharap KKP memberi perhatian serius terkait hal tersebut.

Yang kedua, realisasi anggaran tahun 2021. Untuk realisasi penyerapan anggaran KKP tahun 2021 yang baru mencapai 64,58% Fraksi Partai NasDem mendorong KKP untuk meningkatkan kinerja dan segera merealisasikan kegiatan dan program dalam rangka mengoptimalkan penyerapan anggaran dengan mengutamakan kegiatan padat karya yang akan memberikan dampak

positif pada pemulihan ekonomi nasional. Masyarakat tentunya sangat membutuhkan stimulus melalui program-program dari Pemerintah agar produktifitas tetap terjaga dan mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi terkhusus bagi para pelaku di sektor kelautan dan perikanan.

Yang ketiga, usulan pagu anggaran 2022. Fraksi Partai NasDem mendukung penambahan anggaran KKP, melihat besarnya potensi sektor kelautan dan perikanan yang tidak sebanding dengan anggaran KKP, baik dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan maupun untuk meningkatkan pendapatan negara. besaran target pertumbuhan ekonomi berdasarkan RAPBN tahun 2022 sebesar 5% sampai dengan 5,5% dan target inflasi 3% harus diikuti dengan ketersediaan pangan seiring dengan proyeksi peningkatan permintaan akibat membaiknya daya beli masyarakat. Untuk itu, Fraksi Partai NasDem mendorong KKP untuk menambah dan mempermudah penyaluran bantuan sarana dan prasarana bagi masyarakat sektor kelautan dan perikanan, sehingga dapat terus meningkatkan produksi kelautan dan perikanan nasional.

Yang berikut Fraksi Partai NasDem memandang pentingnya keberpihakan anggaran untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan produktifitas para pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan, termasuk masyarakat kecil ini. Salah satu persoalan yang sering dialami oleh nelayan dan pembudidaya ikan adalah terbatasnya akses permodalan untuk pengembangan usaha. Fraksi Partai NasDem mendorong KKP untuk terus mempermudah prosedur dan meningkatkan nilai fasilitas kredit yang diberikan, sehingga berdampak signifikan bagi para pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan. Fraksi NasDem mendorong agar KKP memberikan dukungan yang lebih optimal terhadap pemberdayaan UMKM sektor kelautan dan perikanan, terutama yang bergerak dibidang pengelolaan pangan. Peningkatan kualitas dan daya saing produksi kelautan dan perikanan harus terus didukung dan menambah ketersediaan fasilitas yang memadai di sentra-sentar produksi hasil laut dan perikanan.

Dalam rangka pembinaan sumber daya manusia khususnya masyarakat perikanan, Fraksi NasDem mendorong KKP untuk terus meningkatkan sejumlah target sasaran, pelatihan, dan penyuluhan, sehingga terjadi peningkatan kapasitas kelembagaan dan kemampuan usaha di bidang kelautan dan perikanan.

Yang berikutnya pada kesempatan ini kami juga menyampaikan aspirasi yang kami terima dari kunjungan daerah pemilihan. Yang pertama dari saya sendiri Sulaeman Hamzah, agar Direktur Jenderal Perikanan Budidaya menindaklanjuti proposal Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kerong, perihal permohonan bantuan alat ekskavator yang diperlukan untuk penyiapan lahan perikanan, saluran *drynase*, dan jalan usaha tani dalam upaya pengembangan kawasan pertanian dan perikanan di Kampung Asaman Distrik Asoswakarsa Kabupaten Kerong. Kerong itu sedikit jauh dari pantai sehingga memang sangat dibutuhkan alat ini untuk budi daya.

Beberapa kali yang kami sampaikan dalam Rapat Kerja, kebutuhan masyarakat daerah pemilihan minta dialokasikan alat tangkap berupa kepiting.

Saya kira ini ketiga kalinya saya bicara soal ini, di setiap kampung daerah pesisir untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat kecil. Kita bicara bantuan yang besar itu untuk nelayan mapan, kapal-kapal itu untuk nelayan mapan. Karena itu perhatian berikutnya saya minta supaya masyarakat kecil yang menggunakan perahu dayung, membuang jala di pinggir. Ini mereka sampaikan berulang-ulang dan saya juga jadi malu kalau pulang ke Dapil. Setiap kali ketemu mereka sampaikan aspirasi ini, saya minta perhatian. Kami juga memohon kepada Bapak Menteri agar program aspirasi yang sudah ditetapkan harus tetap dipertahankan dan tidak terdampak refocusing, karena para Anggota sudah memberikan harapan kepada masyarakat di Dapil.

Yang kedua, Anggota yang terhormat Ibu Yessy Melania melihat potensi-potensi di Kapuas Hulu, kami mendorong adanya program yang berkaitan dengan rantai pasokan dingin, pengembangan tempat pendaratan dan perdagangan ikan, speedboat pengawasan, mesin pakan ikan, dan keramba jaring apung. Yang berikut, mendorong alokasi DAK difokuskan pada peningkatan pengembangan budi daya perikanan darat, beserta potensi ikan bernilai ekonomi tinggi di wilayah Kalimantan Barat. Yang berikut, mendorong pengembangan jalur logistik budi daya industri perikanan dan pemberdayaan masyarakat kelautan perikanan di wilayah Kalimantan Barat.

KETUA RAPAT:

Sudah 5 menit Pak Sulaeman, takut diprotes Ibu Kiki.

F-NasDem (H. SULAEMAN L. HAMZAH):

Terakhir, yang terakhir dari Anggota yang terhormat Abdullah Tuasikal terkait penetapan Provinsi Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Kami meminta keseriusan Pemerintah Pusat melalui KKP untuk segera memberi progress yang lebih konkrit melalui penerbitan payung hukum dan pembentukan badan pengelola lumbung ikan nasional. Yang berikut, mengusulkan DAK dan usulan anggaran tambahan dapat juga dialokasikan dalam rangka pengembangan infrastruktur pendukung di Provinsi Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Dan yang terakhir mendorong pengembangan UMKM perikanan dan pembangunan fasilitas paska panen produk perikanan dan bantuan peralatan tangkap dan modal penangkap ikan bagi masyarakat di pesisir Kabupaten Maluku Tengah.

Inilah beberapa hal yang kami sampaikan dari mewakili dari Fraksi Partai NasDem. Dan Pimpinan, saya ijin untuk menyerahkan.

KETUA RAPAT:

Atau nanti Pak Sulaeman setelah selesai ini kita beri kesempatan untuk memberikan. Ditata dulu biar rapi.

F-NasDem (H. SULAEMAN L. HAMZAH):

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dari Papua ke NTT Pak Edward Tanur.

F-PKB (EDWARD TANUR, S.H.):

Baik.

Selamat siang untuk kita semua.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati,
Menteri KKP, Sekjen, dan jajarannya yang sama pula saya hormati.

Melihat apa fenomena yang sementara terjadi Bapak bingung kami juga bingung, ini mau bagaimana ini. Kita sudah susun program baik-baik terjadi refocusing tanpa melalui kompromi atau melalui diskusi, ini celaka ini. Jadi kami harapkan semuanya itu bisa diselesaikan kalau kita duduk bersama, kalau kita tidak duduk bersama kayak Afganistan, Taliban sikat habis semua itu. Jadi ini kita hanya minta supaya ke depan enak kan kalau kita duduk saling kompromi, saling masukan, kita cari jalan keluar.

Ini negara ini banyak yang urus jadi tidak usah merasa bahwa kita terlalu hebat atau kita terlalu bodoh tidak ada, di dunia ini semua orang pintar semua. Hanya yang tidak pas itu dia mau menang sendiri, ini yang repot kita. Jadi kami dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kami biasanya hanya singkat-singkat saja, hanya point-point saja yang kami sampaikan. Jadi silakan nanti Bapak terjemahkan sendiri apa maksud atau suasana kebatinan Partai Kebangkitan Bangsa itu seperti apa.

Jadi yang pertama mungkin dalam penyampaian kami ini saya beritahu nama dulu. Saya Edward Tanur, daerah pemilihan NTT II, jadi kalau omong kelautan saya sangat tertarik, karena kami NTT ini daerah kepulauan dan dikelilingi oleh lautan yang begitu luas. Maka itu, kalau ada Rapat Dengar Pendapat atau ada kegiatan rapat dengan KKP saya hobby sekali ini, saya senang. Jadi dari PKB itu kami memberikan apresiasi kepada KKP karena pencapaian penyerapan dananya masih kurang maksimal. Jadi tolong kami memberikan karena kurang maksimalnya, tapi mudah-mudahan bisa diperbaiki penyerapannya dipercepat. Ini akibat dari penyerapan yang terlambat akhirnya refocusing, karena Pemerintah atau Menteri Keuangan melihat bahwa ini kemampuannya masih kurang ini.

Jadi cobalah penyerapannya dipercepat sehingga peluang untuk refocusing itu kemungkinan kecil, karena dananya sudah terserap dan sudah dinikmati oleh masyarakat. Kalau kita tidak segera menyerap dana Pemerintah Pusat melihat bahwa dana ini tidak bisa dikucurkan secara maksimal kepada masyarakat. Di satu sisi KKP kan minta agar tahun 2022 dananya ditambah,

tapi kalau tahun 2021 masih ada silva, tahun 2020 masih ada silva, inikan kontradiktif, jadi nafsu besar tenaga kurang.

Jadi itulah yang saya melihat bahwa KKP perlu mendorong Dana Alokasi Khusus untuk membangun sentra pakan ikan budi daya guna menekan harga pakan yang mahal. Jadi sentra-sentra produksi ikan budi daya itu perlu disiasati untuk menyiapkan pakan-pakan ikan yang murah harga, sehingga pembudidaya ini bisa ada keuntungan. Seperti saya sampaikan sekarang ini pakan ikan bantuannya sudah tiba di lokasi saya, pakan ikan 10 ton saya bersyukur. Coba kalau bisa bibit ikannya atau ikannya itu cepat sampai juga, karena sekarang kita mau bagi juga tidak bisa masih menunggu ikannya. Jadi tolong untuk kordinasi dengan ya mungkin kontraktor atau siapa pengadaan bibit ikan segera cepat. Sekarang musim penghujan sudah dekat sekali, kalau pelihara ikan di musim hujan susah Pak, karena kadang-kadang air meluap itu bibit ikan juga kabur semua. Jadi kita menjelang musim-musim gini pas untuk budi daya ikan.

Yang satu lagi pengembangan sentra produksi perikanan tangkap dan budi daya, serta produksi olahan perikanan akan sangat membantu nelayan dalam pemasaran ikannya. Jadi meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Ini semua kita Pemerintah ini semua tertuju kepada bagaimana rakyatnya supaya bisa sejahtera. Makanya kalau dana sudah ada kucurkan saja secepatnya jangan ditunda lagi. CPCL-nya seperti bioflok mana itu sudah 2 bulan atau 3 bulan lalu tapi dananya belum turun-turun ini. Jadi masyarakat bertanya-tanya ini kalau saya sih omong singkat saya bilang ini perencanaan belum matang, jadi kamu sabar saja nanti baru turun, yang jelas ada. Jadi saya mau ngomong gimana ini karena kewenangan untuk menurunkan bantuan ini bukan ada pada saya, saya bilang. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan sedikit masukan kepada pihak dari KKP agar ke depan bisa lebih dipercepat bantuan-bantuan ini.

Mengenai pengembangan UKM, perlu dilakukan secara berkelanjutan dan memperhatikan perkembangan teknologi, sehingga umk mampu bersaing dengan UMK perlu diperbanyak. Jadi hal-hal seperti ini memang kelihatannya sepele, sederhana tapi kalau programnya tidak sinkron biar kita program ke bulan juga percuma.

Penyediaan sarana dan prasarana penggaraman sangat penting dilakukan tetapi perlu juga memperhatikan peningkatan mutu, sehingga masyarakat bisa mengkonsumsi garam secara layak. Dari tadi kami terus menekan di sektor penggaraman karena ironi kita punya garis pantai yang begini luas, hanya masalah NaCl saja alasan bagi kita untuk mengimpor garam. Nah, ini sekolah universitas teknis kimia banyak-banyak ini suruh mereka, kamu bagaimana peningkatan NaCl yang signifikan, supaya kita jangan impor. Ini kendala yang orang bilang turun menurun berulang tahun setiap tahun, 2019 kita ngomong NaCl, tahun 2020 NaCl, 2021 NaCl, sampai kapan ini NaCl ini akan punah dari ini.

Inilah yang membuat kita kalau saya melihat bahwa kordinasi dan komitmen kita ini belum sinkron masih serba tumpang tindih. Ada *mis* antara

kita atau yang dilakukan antara Pemerintah dan legislatif belum adanya kecocokan atau adanya satu kesatuan pemikiran. Legislatif maunya begini karena berdasarkan hasil dengar pendapat atau hasil kunjungan ke daerah-daerah. Sementara eksekutif kurang bukan tidak tapi kurang memahami kemauan dari legislatif, karena legislatif ini turun lapangan.

Kami baru pulang dari daerah Dapil dan kami melakukan banyak komunikasi tapi kami juga pulang dengan malu. Bioflok kita sudah memberikan solusi dilapangan, masyarakat sudah sangat berharap tapi tiba-tiba mendengar refocusing jadi saya tenangkan mereka sabar negara lagi sulit, dalam keadaan sulit, jadi kita boleh bersabar, kita semua punya tujuan yang sama.

Saya kira hanya itu saja yang saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan tapi tujuan kita sama, bagaimana kita menjaga dan mempersatukan masyarakat agar Indonesia kuat, tangguh, dan tumbuh. Terima kasih saya sampaikan kepada pihak KKP dan teman-teman di Komisi IV DPR RI.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Edward Tanur Dapil NTT II, dicatat Pak asisten para Eselon I takut lupa.

Silakan Ibu Riezky, 4,5 menit boleh.

Silakan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pimpinan.

Berdasarkan paparan dari KKP, pertama saya ingin membahas terkait Nilai Tukar Nelayan. Bahwa dicantumkannya NTN ini masuk ke dalam indikator makro menjadikan status nelayan beserta produksinya menjadi penting dan strategis dalam kebijakan makro ekonomi. Oleh karena itu Pak Menteri, saya harap KKP ini membuat program yang sifatnya afirmatif, berpihak kepada nelayan kecil agar mereka menjadi sejahtera. Karena apabila dibuka paparan-paparan ini tidak ada beda yang signifikan dan fokus yang tidak terlalu signifikan juga untuk bicara kesejahteraan nelayan. Saya yakin teman-teman di Komisi IV DPR RI dari tadi yang disampaikan adalah hal tersebut.

Kemudian kedua, postur APBN 2021 memberikan pembiayaan yang ekstra ordinary untuk budi daya. Saya melihat ada angka itu masih ada padahal sudah kita koreksi. Dan saya harap sekali lagi bikinlah anggaran yang proporsional untuk kesejahteraan nelayan.

Kemudian masalah di perikanan tangkap, ada pengelolaan. Saya waktu itu pernah mempertanyakan masalah status 11 WPP, waktu itu kalau tidak salah saya nggak tahu Pak Syarif kemana ya. Waktu itu saya minta data dari Bapak Syarif tapi nggak dikasih-kasih.

KETUA RAPAT:

Kembali ke habitat.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Oh, kembali ke habitat.

Karena ini saya baca di media Pak Menteri juga punya program untuk meningkatkan PNBP Pak, tapi harapannya WPP ini juga harus dikelola dengan satu data yang konkrit Pak. Toh ini bisa menjadi landasan Bapak berpijak, karena hampir semua permasalahan di Indonesia ini adalah masalah data. Bapak punya 11 WPP nah diminta, 178 dan 177 ini banyak teman-teman dari Indonesia timur, Laut Arafuru saya pernah senggol disitu itu *the most fertile ground* yang ada di dunia, tapi *illegal fishing* pun masih berjalan disitu bahwa udangnya juga langsung diambil dari situ untuk dibawa ke Jepang. Makanya penting juga data tadi Pak, supaya saya lihat Bapak juga ada berbicara masalah *off server* waktu itu, teknologi yang akan Bapak *input*, akan *inject* di dalam program-program Bapak supaya bisa maksimal. Dan tapi kembali lagi tidak meninggalkan modernisasi untuk para nelayan Pak.

Kemudian masalah PDS, ini lagi-lagi saya lihat paparan PDS. Saya sarankan PDS ini, ini ada Pak Irjen ya fokus untuk menyelesaikan program-program yang mangkrak saja dulu. Ini program mangkraknya banyak loh, saya barusan ngobrol sama Pak Hermanto juga banyak sekali program-program mangkrak yang harus dituntaskan. Karena sampai kapan pun statusnya akan WDP kalau program mangkraknya kebanyakan. Jadi saya harap Bapak Menteri, kita di sini bukan faktor *like or dislike*, tapi permasalahannya kita ingin membangun di sini Pak. Pemahaman kita sama nelayan, petani itu sama-sama kita dorong supaya nilai tukarnya meningkat.

Jadi kan banyak sekali pasar domestik, waktu itu Pak Ketua kalau nggak salah pernah Kunspek ke Muara Baru ya Pak. Saya yakin Pak Menteri sudah berapa kali putar bahwa yang diperlukan adalah higienis Pak, bahwa ikan itu harus higienis. Bagaimana mau higienis kalau lokasinya saja maaf kata jorok, Bapak mungkin lihat sendiri Pak. Mau bersaing kayak gimana kita, kan begitu.

Terakhir mungkin penting nggak penting tapi ada satu ini mungkin saya minta untuk masukan di kesimpulan rapat Pak. Saya harap teman-teman di KKP dan kementerian lainnya nanti kita ingatkan, ingat Badan Riset dan Inovasi Nasional sudah berdiri. Dan setahu saya ada *do date*-nya itu Pak Pimpinan, *do date*-nya bahwa sudah harus tuntas, sudah harus *running* di awal 2022. Di sini ada BRSDM statusnya seperti apa, jangan nanti barangnya sudah jalan rebutan, akhirnya kita bingung gitu. Kalau yang saya pahami ada satu mitra kita sudah bertransformasi nomenklaturnya. Nah, saya ingin tahu KKP untuk risetnya menjadi apa. Saran saya bikinlah jadi badan kebijakan karena supaya kebijakan ini merata bukan hanya untuk para pebisnis tapi lebih mayoritas untuk para nelayan juga harus. Karena bisnis juga nggak akan jalan kalau nelayannya juga nggak mau jalan.

Sekali lagi saya garisbawahi Pak, masalah Badan Riset yang ada di KKP itu bagaimana statusnya. Karena awal 2022 kalau saya nggak salah saya dapat informasi Pak Ketua, itu bulan April sudah harus *running*. Karena ada asset, ada SDM yang harus Bapak pertimbangkan. BRSDM inikan anggarannya termasuk yang paling gede selalu, karena alasannya SDM-nya banyak. Nah, sekarang status SDM yang ada di KKP seperti apa? Apakah 50-50 BRIN dengan KKP atau bagaimana. Saran saya memang kembali lagi lebih baik KKP membuat badan pengembangan kebijakanlah, karena kita dari tadi saya perhatikan bicara perikanan dari dulu kita selalu bicara perikanan tapi kita lupa kolamnya namanya laut. Ikannya memang banyak, lautnya diabaikan. Jadi saya harap KKP konsolidasi, inovasi, dan riset ini berdasarkan pemahaman kita semua supaya segera kita juga pikirkan Litbang kalau di Kementerian Pertanian, KLHK juga namanya Litbang, transformasinya jadi apa demi kesejahteraan nelayan dan masyarakat dipesisir. Masyarakat pesisir kalau saya lihat, saya dengar dari Ibu Alien waktu itu, dari Bapak Sulaeman lebih banyak diabaikan. Jadi tolonglah Pak, postur anggaran Bapak mulai dari hari ini ke depan berpihak kepada masyarakat nelayan yang mana nilai tukar mereka jauh lebih rendah dari pada nilai tukar petani.

Saya akhiri.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Luar biasa, bijak, waktunya dimanfaatkan maksimal.
Ibu Alien silakan.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI,
Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI,
Bapak Menteri, Bapak Sekjen, beserta dengan Eselon I yang *Insyah Allah* kita selalu dalam lindungan Allah SWT, sehat *wal'afiat*.

Langsung saja saya dikasih waktu berapa ini?

KETUA RAPAT:

3,5 menit.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ini ada diskriminasi antara Kapoksi sama Anggota biasa.

Langsung saja karena memang hari ini kita fokus sama laporan keuangan Pemerintah Pusat APBN tahun anggaran 2020. Tentunya kita sudah mendengar tadi bahwa disampaikan oleh Pak Menteri hasil audit dari BPK adalah WDP (Wajar Dengan Pengecualian) tapi juga kata Pak Guntur wajar dengan perempuan, jangan tegang-tegang Pak.

Jadi Pak Menteri, ingin saya sampaikan bahwa tentunya ini sekarang 4 bulan lagi adalah masa akhir tahun anggaran tahun 2021. Tentunya realisasi anggaran tahun 2021 di bawah masih 64% Insya Allah sebelum tanggal 30 Desember masa akhir tahun pertanggungjawaban anggaran sudah bisa mencapai 100%. Kalau memang tidak bisa sampai Pak Menteri, mungkin harus dilihat lagi apa sih penyebab penyerapan anggaran di KKP.

Rapat Dengar Pendapat beberapa waktu lalu kita sudah mengetahui bersama bahwa adanya refocusing dan itu adalah juga ada permasalahan tentang gagal tender yang dilakukan oleh beberapa Eselon I. Ini harus menjadi satu atensi yang luar biasa, baik dari KKP sendiri dan kita juga dalam fungsi pengawasan dari DPR RI Komisi IV.

Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa anggaran tahun 2021 yang terjadi refocusing memang sangat besar dan ini memang dipaksakan oleh KKP mengajukan pemotongan penganggaran memang tanpa kita sadari, karena memang pada saat refocusing itu mereka juga dipaksa karena kita dalam keadaan Reses. Dalam keadaan Reses nggak mungkin kita membahas anggaran tersebut, tapi mereka juga harus dipaksa untuk pemotongan anggaran. Tapi yang harus kita lakukan bersama adalah konsultasi antara mitra Komisi IV DPR RI dan juga kementerian dari KKP.

Maksudnya adalah di sini Bapak Sekjen sebagai orang yang diharapkan untuk berkomunikasi langsung dengan Pimpinan maupun dengan Anggota DPR RI Komisi IV, tolonglah dijalin silaturahmi itu agar tidak terjadi salah paham antara Anggota Komisi IV DPR RI dengan Pimpinan. Kemudian tidak terjadi salah paham antara Anggota Komisi IV DPR RI dengan KKP, khususnya dengan Kementerian yang terkait.

Saya ingin menanyakan apakah di sini ada perusahaan dari BUMN, Perinus dan Perindo ada, ada ya? Saya nanti kami dari Komisi IV DPR RI memiliki Panja Sarana dan Prasarana Perikanan. Tolong kerja sama dengan baik karena data yang anda punya dan data yang ada di KKP ini sangat kontradiktif dan kami akan menanyakan sespesifik mungkin, karena permasalahan yang dilakukan oleh BUMN ini juga bukan menambahkan hasil untuk negara malah bisa merugikan negara. Ini yang harus kita perbaiki.

Kemudian Pak Menteri yang saya hormati, saya ingin menyampaikan di tahun 2022 ini kita tidak tahu COVID ini masih terjadi apa nggak, berarti kemungkinan besar masih adanya pemotongan anggaran. Maka dari itu, saya mengusulkan apabila KKP dan Komisi IV DPR RI sudah ada persetujuan penganggaran baik per Eselon I nya nanti di Rapat Dengar Pendapat kita akan membahas secara spesifik program-program apa saja yang menyentuh

langsung ke nelayan. Tapi kita juga harus mempersiapkan bahwa kemungkinan besar akan adanya pemotongan anggaran lagi.

Maka dari itu, kami harapkan di Komisi IV DPR RI ini kami harapkan bahwa KKP bisa melakukan penyerapan anggaran paling lambat akhir Maret. Karena saya tahu persis system penganggaran keuangan satu negara akan diaudit atau akan diteliti, akan dilihat pada sama triwulan I, II, dan III. Maka dari itu, mohon dengan sangat anggaran-anggaran yang sudah ditetapkan, yang sudah diajukan nanti kita bahas Pak Pimpinan di Rapat Dengar Pendapat nanti, inikan baru pengajuan awal belum ada persetujuan.

Kemudian saya juga meminta hasil audiensi antara KKP dan Pimpinan dalam Rapat Dengar Pendapat kemarin itu juga menjadi acuan kerangka anggaran di tahun 2022 bisa tepat sasaran. Pak Menteri, saya ingin sampaikan saya sangat mendorong sekali dengan lumbung ikan nasional yang ada di Provinsi Maluku dan juga itu menjadi atensi yang luar biasa bagi kami beberapa dari Indonesia Timur saya pikir ini salah satu terobosan yang baru tapi harus dengan kegiatan yang betul-betul tepat sasaran Pak.

Kemudian saya sangat berharap sekali untuk bisa adanya penjelasan tentang ijin kapal, baik di provinsi maupun dari KKP sendiri kementerian maupun kabupaten kota, karena masih ada lagi ini penyalahgunaan untuk ijin tersebut dan juga batas wilayah. Tentunya kita selalu diperhadapkan dengan keadaan dan situasi alam, tetapi saya ingin mempertegas lagi bahwa ikan tidak dipelihara kalau di laut, ada tidak dikasih bibit tapi orang semua datang untuk mengambil. Saya sangat mendukung kalau memang Pak Menteri mau melakukan pemungutan biaya atau PNBP bagi kapal tangkap yang sudah hasilnya yang ada dan dipungutkan biaya di pelabuhan nanti, tapi bukan kayak kemarin. Mudah-mudahan target dari Rp12 triliun yang kemarin disampaikan oleh Pak Menteri, memang PNBP kita sangat mengharapkan sekalitapi mungkin ada masalah dan problem-problem yang ditemukan pada saat pemungutan tersebut mungkin akan menjadi atensi dari Bapak Menteri yang terhormat. Intinya adalah komunikasi antara dua kementerian ini harus lebih baik lagi ke depan.

Karena saya sudah dikode-kode sama Pimpinan saya Bapak Dedi Mulyadi. Mungkin beliau akan menambahkan sedikit, kodenya baliknya ke saya Pak. Ini masalahnya kita kalau sudah Pimpinan yang bicara kita nggak bisa bicara lagi, padahal kita ingin bicara sama Pak Menteri lama-lama sudah ketemu sama Pak Menteri ini. Jadi itu saja Pak Menteri yang saya sampaikan.

Terima kasih Bapak Ketua yang saya hormati.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Insya Allah hari Jumat kita Kunspek ke sarana dan prasarana ke Jawa Timur karena saya dianggap punya hutang oleh Mas Guntur.

Silakan Bung Dedi, kalau laki Bung nggak tahu kalau perempuan apa, Bung Ansy nanti yang tahu.
Silakan.

F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Bismillahirrahmanirrahim.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Sampurasun.*

Pak Menteri, kita mengingatkan saja setiap hari saya mendapat WA dari para aktifis di Bangka Belitung. Saya ingin meminta keberpihakan Kementerian Kelautan yang setiap hari bicara tentang nelayan terhadap nasib nelayan yang ada di sana. Kapal KIP itu masuk ke pantai dalam setiap hari karena memang berijin. Dari sisi aspek legal memang mereka legal tetapi nelayan sudah kehabisan ruang lautnya untuk mengambil ikan. Pada akhirnya mereka diperiksa oleh Polisi karena dianggap menghalang-halangi penambangan, karena itu ada Undang-Undang yang mengatur.

Yang berikutnya lagi mereka melakukan aksi naik ke kapal penghisap timah kemudian pada akhirnya mereka juga diproses juga. Akhirnya kemungkinan besar, saya katakan kemungkinan besar dibarter. Mereka bisa dilepas tetapi tidak protes lagi urusan penghisapan timah. Setiap hari kita berbicara tentang keberpihakan terhadap nasib nelayan tetapi kita tutup mata terhadap hilangnya mata pencaharian nelayan di Bangka Belitung. Dan Komisi IV DPR RI pernah sekali berkunjung di sana dan sampai hari ini tindakan-tindakan represif terhadap nelayan masih berlangsung. Dan Bapak bisa tahu sendiri dalam jangka panjang saya yakin Provinsi Bangka Belitung akan kehilangan ikan, karena apa? Ruang-ruang lautnya sudah habis oleh penambangan ini. Dan ujungnya adalah setelah selesai penambangan rakyat akan kehilangan mata pencaharian karena reklamasi atau *recovery* lingkungan seringkali tidak konsisten dilakukan oleh para pengusaha. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya mengingatkan kembali dulu di Pengandaran itu ada penangkapan kapal asing *illegal fishing* dan kapalnya masih tergeletak sampai hari ini. Semoga di tahun 2022 bisa ditarik ke pantai untuk digunakan sebagai tempat rekreatif bagi masyarakat. Itu dananya kurang lebih kalau berdasarkan penghitungan saya dulu pernah ngomong sama Pak Direktur Jenderal itu kurang lebih Rp500 juta kalau ditarik ke pantai.

Yang ketiga, problem dari para peternak ikan keramba atau kolam itu umumnya adalah mahalnya harga pakan. Ketika mahal harga pakan kemudian produksi meningkat, harga ikannya jatuh, itu yang selalu berakibat kemiskinan bangkrut. Nah, sehingga kenapa kita tidak mencoba untuk yuk secara bersama-sama mendorong agar para petani ikan di jaring apung maupun di kolam itu didorong untuk mengelola sentra-sentra pakan di wilayahnya masing-masing. Karena kalau bicara pakan itu bicara persoalan industry, bicara kelompok yang sangat menguasai regulasi pakan, baik pakan ikan maupun pakan ternak lainnya. Dan itu memang menghasilkan duit yang berlimpah

dalam setiap waktu. Saya berikan beberapa titik wilayah misalnya yang kaya dari peternakan ikan itu bukan petaninya tapi yang kaya adalah juragan pakannya. Dia menguasai distribusi pakan, dia menguasai distribusi benih, dan dia juga menguasai distribusi penjualan ikannya. Tiga hal ini dia kuasai semua. Jadi sampai kapan pun nggak akan bisa mereka menjadi kaya. Itu saja barangkali titik fokus.

Dan terakhir saya minta Pak Menteri untuk lobby Pak Presiden. Logika refocusing itu, itu yang gede itu dipotong, jadi yang aneh itu adalah sudah KKP ini kecil setiap refocusing dipotong terus. Harusnya kan KKP itu idealnya dulu 11, nah yang di bawah 11 itu jangan dipotong. Ini sudah di bawah 11 dipotong lagi kalau besok ada refocusing lagi ya jadi lagi bukan refocusing itu namanya recopusing banget. Ini harus segera dibicarakan Bapak kan bisa dengan Presiden logikanya pemotongan anggaran itu tidak bikin flat 10% dipotong semua 10%. Harusnya dipilah kementerian ini karena sudah besar ini, kementerian ini karena sudah kecil dipotong ya bagaimana sudah kecil dipotong ya akhirnya Bapak dimarahin terus sama Anggota Dewan termasuk Pak TA. Khalid. Saya juga termasuk Pak, sudah sosialisasi mau ada pasar ikan tiba-tiba nggak jadi. Tapi nggak apa-apa kalau saya sih nggak malu, karena saya pikir Bapak juga sudah berat banget. Buktikan Bapak mantan seorang pengusaha karena sekarang nggak boleh pengusaha. Kalau Bapak jago lobby, lobby Bapak Presiden dan Menteri Keuangan, nggak boleh lagi potong anggaran KKP.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.
Selanjutnya Bung Hansi.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih Pak Kyai Hasan.

Pimpinan, Pak Menteri yang saya hormati, Bapak sekjen, dan jajarannya.

Saya pertama mau kasih apresiasi dulu, jadi Pak Menteri terima kasih sudah mengeluarkan Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 itu soal pelarangan ekspor benur lobster dan prioritas budi daya. Saya kira kita harus *fair* juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya sejak pertama kali duduk di sini, ini yang selalu saya bicarakan. Dan ujungnya kita berharap kebijakan Pak Menteri, pelarangan ekspor benur lobster ini dan prioritas pada budi daya ini bisa meningkatkan kesejahteraan terutama nelayan-nelayan kecil dan efek keberlanjutannya itu betul-betul bisa kita capai.

Namun ada persoalan Pak Menteri, terutama terkait dengan bagaimana mengawasi dan memantau proses perijinan dan verifikasi para nelayan untuk menangkap benih-benih lobster ini Pak. Kami mendapatkan laporan berdasarkan informasi itu Pak, inikan proses pengajuan itukan bisa melalui online ke KKP tapi ijin itu harus juga diverifikasi oleh Dinas Kelautan dan

Perikanan di tingkat provinsi Pak. Yang kami dapatkan informasi Pak, saya ambil contoh ada untuk jenis benur lobster pasir yang harganya Rp5.000 per ekor ataupun jenis lobster mutiara yang harganya Rp10.000 per ekor itu Pak. Itu nelayan-nelayan dipaksa oleh Dinas Perikanan dan Kelautan setempat bekerja sama dengan pengusaha kurang ajar harus menjual hanya harganya Rp2.000, baik untuk lobster pasir dan juga lobster mutiara.

Jadi kalau 1 juta lobster yang dihasilkan itu bisa terjadi perompokan atau penghisapan sebesar Rp3 miliar dan Rp7 miliar Pak. Mohon Bapak jangan terus percaya saja kepada Dinas Kelautan dan Perikanan di level daerah, harus diperiksa betul jangan sampai kebijakan Bapak tujuannya untuk mensejahterakan para nelayan kecil tetapi fakta di lapangan membuat nelayan ini menjadi sengsara. Ini menurut saya tindakan-tindakan yang sangat kurang ajar. Di atas kertas bagus Pak, tolong ini saya berikan apresiasi.

Yang kedua Pak, jujur kalau tadi sudah bicara soal serapan saya mau ngomong lebih konkrit kenapa sih dua Direktur Jenderal yang sangat vital dan strategis di KKP ini serapannya rendah, perikanan tangkap dan budi daya. Inikan langsung konkrit ke masyarakat, kalau serapan rendah berarti tidak ada program atau minim sekali program yang menyentuh kepada kebutuhan rakyat, padahal hari ini kita lagi dalam situasi pandemi Pak. Jadi jangan dianggap ini hal yang biasa Pak. Buatlah loncatan-loncatan yang luar biasa penyerapan ini Pak. Saya terus terang Pak, hampir malu setiap kali ketemu nelayan. Mohon maaf Pak, bahkan menghindari kalau ketemu nelayan Pak. Di NTT itu Pak, saya mau tanya Pak, kemarin ada badai seroja apa tindakan konkrit yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk bantu nelayan yang kena dampak badai seroja Pak, saya jawab saja tidak ada. Tolonglah Pak, ini kita bicara ini ya ada skala prioritasnya.

Tadi Pak Suhardi sebagai Anggota Banggar sudah ngomong yang difocusing itu perjalanan dinas, biaya rapat, konsumsi, operasional kantor, rehabilitasi, dan sebagainya. Jangan potong alokasi konkrit yang langsung kepada rakyat Pak. Mohon maaf ini Pak, saya harus bicara apa adanya ya apresiasi yes tapi evaluasi dan kritisi juga menurut saya juga harus saya sampaikan Pak.

Ya saya kira itu saya mendukung Pak, meningkatkan pagu anggaran di 2022 karena terus terang luas Indonesia ini luas daratan dan lautan ini, lautannya jauh lebih luas dari daratan. Tapi tolong, oh terakhir Pak ada satu lagi. Kali lalu BRSDM KP melalui kepalanya kalau tidak salah Prof. Syarif itu menyampaikan kepada kami untuk boleh merekomendasikan sejumlah nama calon siswa dan mahasiswa untuk disekolahkan di sekolah milik KP. Di Kupang itu ada Pak, saya sudah mengumpulkan dan kemudian mereka sudah ikut tes sampai kepada vase wawancara Pak. Kok tiba-tiba mereka itu diminta melalui saluran telepon diminta dana untuk bayar Rp4 juta sampai Rp6 juta untuk biaya pakaian seragam Pak. Padahal dana yang disetujui kita BRSDM ini termasuk tinggi Pak. Saya bingung kalau ada Rp4 juta sampai Rp6 juta kenapa tidak ditulis dari awal Pak.

Yang kedua, saya minta staf saya, saya sebut staf saya namanya Ciko telepon Kepala Sekolah di Kupang itu ditanyakan itu dana apa Rp4 juta sampai Rp6 juta, dijawab dana seragam. Kalau ada dana seragam Pak, dan ini kita terbuka saya yakin Komisi IV DPR RI tidak akan setuju hal itu. Dan bagi kami rakyat saya Pak, anak nelayan, anak petani, Rp4 juta sampai Rp6 juta itu besar sekali Pak. Ini pungli atau apa Pak, tolong dibereskan Pak. Karena staf saya langsung menelepon dan dengan percaya diri kepala sekolahnya bilang itu untuk seragam. Kalau itu benar Pak, tolong dicopot orang itu Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya Pak dr. Slamet ustad, PKS.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Lama nggak ketemu pada lupa.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Kyai, lama nggak ketemu jadi kelihatan lebih muda dan juga Pimpinan-pimpinan yang lain lengkap.

Pak Menteri beserta jajarannya, Pak Sekjen yang saya hormati.

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan Rapat Kerja hari ini. Yang pertama, saya menegaskan hasil laporan keuangan, bahwa tahun 2019 itu WTP, tahun 2020 WDP. Apakah nanti ini menjadi taruhan? Secara umum bisa kita sampaikan bahwa kinerja Kementerian KP atau KKP ini menurun. Dan ya ini fakta laporannya menunjukkan demikian, sehingga di tahun 2021 kita akan lihat kepemimpinan menteri yang baru apakah akan seperti itu. Dan ini terasakan oleh kita betapa program-program di lapangan juga tidak banyak terealisasi. Tentunya kita ingin mendapatkan gambaran bagaimana kemudian hal ini bisa terjadi. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya menemukan di laporan atau presentasi yang disampaikan tidak ada catatan capaian dari kinerja yang ada. Apakah memang ini sengaja tidak disampaikan atau memang menutup-nutupi ketidakbisaan atau ketidakmampuan dalam mencapai target. Dicatatan saya untuk laju pertumbuhan PDB perikanan tahun 2020 itu targetnya 7,9% realisasinya 0,73% sangat jauh dari target yang dicanangkan. Karena kiat Rapat Kerja hari ini juga salah satunya evaluasi di situ. Yang kedua, produksi perikanan itu targetnya 26,46 juta ton realisasinya hanya 7,6 juta ton. Untuk nilai ekspor hasil perikanan targetnya 6,17 miliar Dolar Amerika tapi realisasinya cuma 0,125 miliar. Nah, ini mohon penjelasan juga kenapa hal-hal ini tidak tercapai. Apakah memang Eselon I dan jajarannya memang sudah tidak siap bekerja, artinya begitu kan. Sangat jauh dikaitkan dengan prosentase serapan dari anggaran termasuk tadi

WDP. Itu catatan saya yang kedua, mohon dijelaskan untuk jauhnya capaian dari target yang ada di tahun 2020.

Dan yang terakhir, saya juga ingin menguatkan dari beberapa yang disampaikan oleh teman-teman bahwa untuk program refocusing ini kami tidak melihat keberpihakan dari KKP kepada program-program rakyat. Banyak program yang menjadi harapan dari rakyat kemudian dihapus, sementara program-program yang tidak terkait dengan rakyat masih bertahan dan cokor di situ hanya diganti nomenklatur saja. Satu hal yang saya buka, misalnya di program dulu shrimp estate kita di Komisi IV DPR RI nggak setuju, tetapi di situ ditulis menjadi modeling kawasan budi daya udang senilai Rp250 miliar masih ada di situ. Saya tanya di mana program ini keterkaitannya dengan pemberdayaan rakyat, sementara program-program yang di Dapil semua hampir semua dihilangkan, mohon penjelasannya. Itu Pak Ketua, yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Silakan Ibu Anggia melanjutkan mempertajam dari Pak dr. Slamet.

F-PKB (ANGGIA ERMA RINI, MKM./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Bapak dan Ibu sekalian.

Saya melanjutkan Pak Slamet tadi, angka itu tadikan bukan angka main-main Pak. Jadi kalau kita lihat nggak ada namanya evaluasi itu pasti ada keterangan ada apa dengan capaian itu. Kalau misalnya hanya sekian yang tercapai kan jauh banget angka yang tadi disebutkan dan itu harus ada catatan kira-kira apa nih ininya masalahnya kenapa nggak tercapai. Mestinya ada di dalam paparan tadi. Jadi tidak hanya kita tidak tercapai ini a, b, c, d, jadi harus benar-benar ada catatan bahwa ada analisa. Saya yakinlah kalau para pejabat bisa melihat apalagi sudah bertahun-tahun membahas atau menggeluti tentang perikanan dan kelautan mestinya ada. Dan kami memang minta Pak, saya minta untuk bisa ada catatan kalau bahasanya Pak Slamet tadi ada catatan, kalau bahasa saya ada evaluasi, ada narasinya, ada temuan yang dilapangan itu apa, dan kita dikasih tahu.

Itu termasuk juga saya menggarisbawahi Pak Suhardi Duka, jelas dipermintaan dari Menteri Keuangan bahwa yang direfocusing itu ya perjalanan dinas, sebagian besar harusnya perjalanan dinas. Nggak ada Pak, nggak ada maksudnya apa, begini-begini maksudnya apa, sudah nggak ada lagi, sudah nggak ada perjalanan dinas, sudah direfocusing semua, tetapi tetap kurang. Saya pikir itu nanti mohon dijelaskan saja.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Anggia.

Selanjutnya Mas Ichsan Firdaus, Fraksi Partai Golkar, kuning bajunya.

F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Ketua, terima kasih.

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya buka saja ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan terkait dengan bagaimana integrasi antara anggaran pusat dan anggaran Dana Alokasi Khusus yang dibahas pada hari ini. Ada beberapa kegiatan mestinya memang kita tidak perlu mencantumkan, tidak perlu diprogramkan di anggaran pusat. Sepengetahuan saya, saya baca di sini di dalam dua lembar ini, bahwa ada usulan tambahan anggaran terkait dengan penyediaan Sarpras, kemudian rehabilitasi sarana dan prasarana hasil pengolahan hasil perikanan.

Sepengetahuan saya Pak Menteri, misalkan satu TPI (Tempat Pendaratan Ikan) itu tiap tahun kita selalu dulu ya bukan sekarang, itu selalu di Dana Alokasi Khusus. Kemudian ada beberapa misalnya pasar ikan modern dan pasar ikan higienis di PDS, kenapa itu tidak di DAK-kan saja Pak, toh ini sebenarnya sama saja itu juga pembangunan di daerah. Jadi kalau kemudian ini jadi kita bisa melakukan penghematan untuk hal-hal yang sifatnya lebih produktif di belanja pusat. Ini saya mau mengusulkan saja.

Jadi ada beberapa kegiatan yang semestinya tidak perlu dicantumkan di anggaran pusat atau bahkan misalkan tumpang tindih Pak Menteri antara anggaran pusat dengan anggaran daerah. Ini saya sisir satu-satu mungkin nanti pas pendalaman kita sisir sama-sama. Tapi saya minta persetujuan dari Pak Menteri nanti apakah kemudian anggaran-anggaran yang semestinya tidak ke daerahkan itu cukup saja di daerahkan jangan di pusat lagi, jadi saya khawatir ini ada tumpang tindih. Ini saya sedikit saja terkait dengan itu.

Saya sebutkan satu-satu ya Pak Menteri, kalau boleh. Ini pertama di apa namanya di Direktur Jenderal Perikanan Tangkap ada namanya Kampung Nelayan Maju, kenapa ini nggak kita daerahkan saja. Kemudian pembangunan Rumah Ikan misalnya, itukan sebenarnya sama saja infrastruktur perikanan tangkap. Kalau kemudian saya setuju kalau pembangunan rehabilitasi pelabuhan perikanan karena ada beberapa kewenangan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terus kemudian ada rehabilitasi TPI misalkan kenapa nggak kita ke daerahkan saja pembangunan daerah. Kemudian di Budi Daya, saya tidak menemukan itu tapi di PDS yang agak banyak ini Pak Menteri. Pasar ikan misalnya, kemudian pasar kuliner, dan sentra promosi produk perikanan. Lalu kemudian ada pabrik es, lalu ada beberapa kampung-kampung budi daya

yang saya coba. Kita pikirkan bagaimana caranya agar itu di daerahkan saja, akhirnya apa? Nanti DAK-nya itu kita tambahkan menunya. Biarkanlah kemudian daerah-daerah itu yang kemudian punya inisiasi untuk membangun prose-proses itu. kecuali kemudian kalau memang kita mau bikin modeling, misalnya di NTT ada kampung budi daya ikan apa begitu, kalau itu modeling oke saya setuju tetapi kalau kemudian kenapa nggak kita masifkan saja sekalian di daerah-daerah situ. Saya usulan begitu.

Yang kedua adalah boleh saya menyoroti sedikit terkait dengan PDS ini Ibu Direktur Jenderal. Ada beberapa kegiatan yang kecil-kecil lalu kemudian untuk apa dilakukan. Misalnya saja ada peralatan pengolahan, ada kemudian perlengkapan pedagang ikan, ada peralatan pemasaran 25 unit Rp2,6 miliar itu totalnya. Kenapa nggak sekalian saja misalnya satu fokus, misalnya ambil contoh kalau memang untuk *cool box* saja untuk...*cool box* saja semuanya, jangan ada peralatan untuk pemasaran, ada peralatan pedagang ikan kalau kecil-kecil. Kalau kemudian kita kasih panci begitu lebih baikkat *cool box* saja yang lebih efektif. Artinya difokuskan saja pada satu kegiatan yang memang dampaknya cukup lumayan. Kalau peralatan ikan, peralatan perdagangan, kemudian kasih-kasih sedikit-sedikit itu untuk apa begitu. 250 unit tapi kalau kemudian itu satu fokus untuk tahun ini, tahun depan maksud 2022 kemudian kita massif itu jauh lebih efektif dibandingkan kemudian kita bagi kecil-kecil tapi jenisnya berbeda. Ada satu jenis saja saya usulkan misalnya saja *cool box* misalnya itu bermanfaat buat petani ikan. Kalau kemudian peralatan pemasaran, pedagang ikan, dan sebagainya ya kecil-kecil sayang banget anggaran.

Kalau saya boleh menyoroti kasihan sudah anggarannya kecil KKP ini, tapi dibaginya kecil-kecil juga. Lebih baik kemudian fokus saja pada satu titik, kalau kata Via Valen begitu Pak Menteri, kalau kami bilang fokus satu titik tapi efektif, bagi saya begitu. Dari pada kemudian kecil, artinya terkesan dalam tanda kutib terkesan anggaran kita ini ada anggaran kecil dibagi-bagi ke semua direktorat kecil-kecil pula. Lebih baik ada hal yang kita coba hilangkan tapi fokus pada satu titik, itu yang sering disebut oleh Via Valen pada saat Asean Games itu.

Artinya, ada dua yang ingin saya kritik. Pertama, tolong kalau ada anggaran yang kemudian kita daerahkan kita daerahkan saja ngapain kemudian kita pusatkan, kecuali kita bikin modeling itu berbeda. Artinya modeling itu sebagai contoh bahwa nanti tahun depan 2023 kita membangun secara massif tapi alokasikan ke daerah. Ini saya inventaris lumayan ada penghematan lumayan, nanti kita cari sektor-sektor yang lebih produktif. Mungkin nanti pas pendalaman akan kita sampaikan. Jadi tolong pikirkan saya usulan menu-menu yang ada di DAK ini ada beberapa anggaran pusat kita daerahkan saja. Pasar ikan modern, pabrik es misalnya, lumayan pabrik e situ ada 5 unit ada Rp30 miliar, kasih saja ke daerah, DAK, bahkan bangun saja di situ.

Sepengetahuan saya yang namanya pabrik ini setiap tahun selalu ada. Pasar ikan modern, pasar ikan higienis ini setiap tahun selalu ada, kenapa nggak kita daerahkan. Kalau mau bikin modeling ya sekali saja satu tahun

setelah itu baru contoh, itu loh yang namanya pasar ikan yang benar itu yang ini anda silakan saja pakai DAK, usulkan ke pusat. Jadi nanti biar DAK yang mengalokasikan, walaupun DAK kita kecil. Artinya lebih fokus misalnya saran saya kalau sekarang DAK-nya ada berapa Pak Sekjen DAK hari ini, dapat pagunya berapa Pak Sekjen, 700 ya, 500 atau 700 Pak Sekjen, 700 kabupaten, 500 provinsi.

Nah, artinya ya kita bikin saja jadi menu-menu yang ada ini nggak usah banyak-banyak begitu. Jadi ada beberapa alokasi yang semestinya ke daerahkan tapi kemudian masih di pusatkan, nanti tumpang tindih. Tapi nanti kita diskusi lebih jauh dipendalaman, mungkin Pak Menteri saya minta tolong sama Pak Menteri perintahkan kepada Eselon I untuk kemudian bagaimana memisahkan mana anggaran daerah dan mana anggaran pusat. Modelingnya kita bikin, oke saya setuju bikin modeling tapi kemudian setelah sudah selesai ya kita daerahkan saja. Sehingga belanja pusat itu jadi lebih efektif untuk hal-hal yang sifatnya sektor produktif lainnya.

Itu saja saya Pak Ketua, saya usulkan ini usul-usulan sedikit saja mumpung teman-teman yang lain sudah banyak mengusulkan, tapi kalau saya usulkan. Artinya dari tadi saya melihat teman-teman belum melihat DAK sebagai sebuah instrument untuk mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Di sini kita punya ada hampir 1,2 kenapa nggak kita efektifkan untuk hal-hal yang mestinya tidak dilakukan di pusat tetapi kita lakukan di daerah.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Muslim, Demokrat, Aceh.

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi IV DPR RI,
Bapak Menteri, Pak Sekjen, dan jajaran Kementerian KKP.

Pertama, memang kalau kita lihat semangat Pak Menteri ini luar biasa Pak Menteri tapi kenyataan hari ini memang sulit ya. Artinya, termasuk berkaitan dengan PNBP. Tentu dalam hal ini kita akan mendukung *full* ya Pak Menteri, berkaitan dengan spirit Pak Menteri, apalagi berkaitan refocusing anggaran. Saya sepakat tadi yang disampaikan Kang Dedi ya ini Pak Menteri harus melakukan segala upaya ini. segala upaya semaksimal mungkin bagaimana anggaran KKP ini walaupun direfocusing jangan terlalu besar. Jadi

sehingga program-program yang kecil-kecil pun yang aspirasi Dewan ini juga tidak ter-cover Pak Sekjen, ini penting ya Pak Sekjen.

Yang kedua Pak Menteri, ini mungkin saya ingin menanyakan kembali berkaitan dengan aspirasi daerah 32 nelayan Aceh yang masih sampai hari ini ditahan di Thailand. Saya tidak tahu nanti apakah Bapak Direktur Jenderal Tangkap atau Pak Sekjen bisa menjelaskan, karena sampai hari ini Pak Khalid yang 32 nelayan ini sampai hari ini belum mereka kembali, belum selesai, dan ini mudah-mudahan saya berharap dari Kementerian KKP bisa berkordinasi dengan Kementerian Luar Negeri berkaitan dengan nelayan yang 32 ini. Waktu itu kebetulan saya yang kesana Pak, sama teman-teman KKP waktu hadir di Aceh Timur. Mudah-mudahan ini bisa di-back up terus supaya mereka bisa didampingi sehingga mereka bisa kembali ke daerah masing-masing.

Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan ekspor ini Pak Menteri. Saya semangat betul, saya berharap nanti mohon Bapak Menteri itu diberi pendampingan khususnya daerah-daerah ini, khusus pengusaha-pengusaha di daerah ini bagaimana mereka setiap tahun terus ada peningkatan ekspor. Contoh seperti di Aceh itu Pak, itu di Aceh dari 23 kabupaten kota hanya 1 perusahaan yang baru bisa ekspor. Kita berharap karena banyak sekali pelabuhan-pelabuhan di sana yang potensinya bagus. Saya berharap dari sini ada kementerian jemput bola Pak Menteri, artinya ketika teman-teman turun ke daerah berikan pendampingan seperti apa. Jadi sehingga hari ini ada satu perusahaan kemudian bisa setiap tahun ada peningkatan. Jadi sehingga peningkatan ekspor tentu kan penambahan dari pada PNBPN buat negara.

Ini mudah-mudahan bisa menjadi bukan hanya untuk Aceh saya yakin secara nasional. Ini dari Kementerian KKP saya pikir harus terus diberikan pendampingan, apakah diberikan strategi-strategi jadi sehingga pengusaha-pengusaha lokal yang bergerak di sektor perikanan mereka juga bisa semakin hari semakin tumbuh dari pada pengusaha lokal untuk bisa melakukan ekspor dari berbagai komoditi perikanan di daerah. Mungkin itu beberapa Pak Ketua.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak dan Ibu, sebelum saya beri kesempatan kepada virtual, ada yang memberikan saran, pendapat. Maksudnya Pak Hermanto lah.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak Kyai.

Saya betul-betul terima kasih banget sama Pak Kyai ini, hari ini baik banget.

KETUA RAPAT:

Kan setiap saat saya beri kesempatan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kok cuma hari ini.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Alhamdulillah Pak Kyai, semoga Pak Kyai sehat, panjang umur, banyak rezekinya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan yang saya hormati,
Anggota dan Pak Menteri bersama jajarannya.

Pertama saya ingin mengingatkan Pak Menteri saja, tadi sudah banyak yang menyinggung itu terkait dengan kinerja keuangan. Saya sangat turut berdukalah kalau misalnya kementerian ini terus dirundung hasil kinerja itu hanya WDP-WDP terus. Kami sebagai Anggota Komisi IV DPR RI ini, ini sebenarnya juga turut bertanggungjawab. Tapi kalau ini dikelola secara terus menerus begini ya kami kecewa dan kami minta supaya ini diperbaiki.

Kemudian yang kedua, ini terkait dengan proyek-proyek yang mangkrak. Saya setuju dengan Ibu Kiki tadi bahwa kita lebih memprioritaskan mana proyek-proyek yang sekarang ini setengah jalan itu diteruskan itu. Seperti contoh di Damas Raya itu ada sejenis bioflok besar itu sampai sekarang tidak jelas itu, padahal kita sudah mengalokasikan anggaran besar dan itu terjadi juga di beberapa tempat.

Ketiga, saya minta supaya ini pembudi daya ini, ini harus dilengkapi juga dengan keahlian membuat pakan. Kemarin saya juga mengapresiasi sebenarnya ada pelatihan terkait cara membuat pakan ikan. Saya juga menyangkan terkait dengan pakan ikan ini, ini pakan ikan yang disalurkan kepada pembudi daya ikan ini adalah pakannya tenggelam. Sementara ikan-ikan yang kita, bibit yang kita bantu itu adalah ikannya masih kecil-kecil kayak semut, nggak bisa dia memakan pakan ikan yang seperti itu. Jadi saya minta supaya ada semacam penyesuaian sesuai dengan tingkat besaran ikannya, sehingga kita memantu masyarakat ini tidak sia-sia.

Kemudian terkait yang terakhir, saya melihat daya serap atau realisasi anggaran kita ini sampai dengan Agustus sekarang ini baru 56,3% berarti masih ada sisa kurang lebih 43% yang belum terealisasi. Disandingkan dengan realisasi *out standing contract* itu 64,8% atau yang belum terealisasi itu artinya

sebesar 35%. Artinya ini kita dikaitkan dengan konsen waktu, waktu tinggal hanya 4 bulan lagi. Nah, saya berharap supaya ini target-target yang sudah terpasang di sini saya minta supaya direalisasikan supaya apa yang kita harapkan untuk pertumbuhan ekonomi di sektor perikanan ini bisa memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Demikian Ketua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Doktor Hermanto.

Saya ingin memberi kesempatan kepada yang virtual kasihan semenjak awal Pa Haerudin mau, satu kata, dua kata patah, silakan.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Menteri beserta seluruh jajaran di Kementerian KP, Pimpinan Komisi IV DPR RI dan Anggota yang saya cintai dan saya hormati.

Saya ingin sampaikan sebagaimana saya pernah sampaikan kepada Bapak Sekjen tentang kenyataan TPI-TPI kita yang mangkrak, tentang gagalnya *water breaker*, tentang gagalnya proses perencanaan, mungkin ini Pak Direktur Jenderal Tangkap sudah saya sampaikan. Untuk dimaklumi bahwa ini adalah kerja asal-asalan di daerah setiap itu digunakan rusak pelabuhan, yang rusak nelayan, mereka susah mendarat. Sudah susah kondisi laut, sudah susah mendaratnya, sudah susah berpendapatan, sudah susah daya tukar nelayan sekarang sudah sulit.

Yang kedua, ingin kami sampaikan Pak kondisi pandemi seperti ini mohon untuk dipahami bahwa seluruh program seharusnya penyelamatan kita karena sekarang wabah yang menyebar, susah pekerjaan, tentu banyak pengangguran, dan orang dalam kondisi serba kesulitan. Bagaimana program ruang kita justru seperti padat karya melibatkan banyak warga ataupun menjadi ruang pertahanan pangan kita justru itu yang harus kita dorong hari ini. Karena memang kalau yang mercu suar besar-besar seperti yang teman-teman sikapi tadi tentu itu akan jadi masalah bagi kita semua, tidak menjadi solusi yang pendek bagi kondisi keadaan masyarakat kita yang sedang menghadapi bencana wabah hari ini.

Terima kasih Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kepada segenap Anggota Komisi IV DPR RI virtual, saya mohon dengan hormat untuk tidak mengulang apa yang telah disampaikan oleh para Bapak

dan Ibu yang hari ini telah menyampaikan saran dan pendapatnya. Ada tiga, yang pertama Pak Mindo Sianipar kami persilakan. Setelah itu Mas Sutrisno.
Pak Mindo Sianipar.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Baik, terima kasih Pak Pimpinan, Pak Kyai.

Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, ini tentang garam sekali lagi tentang garam. Ada kecenderungan karena kita panjang pantai terbesar nomor dua di dunia terus kita berpikir kenapa kita tidak bisa sekarang ini mensupply secara nasional untuk kebutuhan nasional. Setelah saya pelajari ternyata dari panjang pantai itu, mudah-mudahan dikoreksi nanti sama Kementerian tidak sampai 10% panjang pantai itu yang bisa air lautnya digunakan untuk menjadi garam. Jadi itu persoalan pertama, hanya daerah-daerah tertentu di Jawa Timur Madura, selamat, banggalah, bergembiralah karena Madura itu hampir semua kabupaten bisa. Pak Johan NTB, Lombok itu juga luar biasa, Sumatera itu tidak ada yang bisa tempatnya untuk bikin garam.

Yang kedua Pak Menteri, kebiasaan petambak garam pun harus dirubah, teknologinya harus dirubah. Harus ada desiminasi teknologi kepada mereka. Kalau kita jelaskan tanggung-tanggung maka mereka mengatakan dari mbahnya mbah saya ya sudah seperti ini, begitu juga kalau petani padi mengatakan seperti itu dari mbaknya mbah saya petani itu seperti ini. Pernah suatu ketika saya jawab, *karena dari mbaknya mbah sampean membuat seperti itu ya hasilmu sama dengan mbah-mbah dulu*, itu gunanya teknologi.

Yang ketiga, tentu kita arahkan industrinya itu mengarah kepada UMKM dan koperasi badan hukumnya. Teknologi kearah sanalah yang harus kita lakukan dan itu sudah ada di Indonesia. Dan hasilnya sangat memuaskan, memenuhi standar industry, baik untuk garam konsumsi, garam industry, dan bahan baku garam farmasi. Jangan kementerian sampai terjebak dengan pandangan-pandangan dari prosesor garam yang mengambil harga garam sangat rendah, mereka proses, mereka jual, jauh marginnya tinggi. Sekarang kita ingin membuat margin di tingkat petambak garam yang harusnya lebih tinggi. Nah, itu bisa kita lakukan misalnya dengan memanfaatkan LPDB, baik di Kementerian Koperasi maupun di Kementerian Kelautan. Karena itu saya berharap sekali ada kerja sama yang baik antara Kementerian Kelautan, Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri, karena salah satu konsumen terbesar itu adalah Pemda-Pemda. Ingin saya melihat Kementerian membuat program ini di 2022, tidak membebani APBN yang besar.

Terima kasih Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Mindo.
Selanjutnya Mas Sutrisno.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Pimpinan, saya mau fokus pada fungsi anggaran ini. Saya tidak bermaksud mengulangi tapi mau mendalami. Yang pertama, keprihatinan saya dan saya meyakini juga seluruh Anggota Komisi IV DPR RI tentang menurunnya predikat pengelolaan keuangan KKP dari 2019 WTP, 2020 WDP. Lebih prihatin lagi penyebabnya adalah yang pertama adalah terkait pada kebijakan ekspor benih lobster ini diakibatkan pada tataran kebijakan dilaksanakan sebelum menentukan kebijakan penetapan PNBP-nya, sehingga negara dalam hal ini KKP kehilangan peluang untuk mendapatkan sumber PNBP dari ekspor tersebut.

Yang kedua, penyebabnya adalah karena lemahnya sistem pengendalian internal terkait dalam pengelolaan BLU apa namanya PMUKP, tidak tertibnya aliran kas, tidak tertibnya pengeluaran, tidak tertibnya pendapatan. Ini menengarai manakala tidak diperbaiki dengan baik akan menimbulkan kerugian negara ke depan. Bisa-bisa karena ketidaktertiban sumber pinjaman yang diberikan sehingga tidak ditata usahakan dengan baik sehingga KKP akan kehilangan berapa sesungguhnya jumlah pinjaman yang disalurkan oleh BLU tersebut. Untuk itu, kami mohon melalui Pimpinan agar Menteri KKP sungguh-sungguh menangani permasalahan ini.

Yang kedua, realisasi anggaran, 2020 hanya mencapai 91,27% 2021 sampai hari ini 64,58%. Saya mensikapi ketidakcapaian realisasi anggaran itu ditengarai oleh realisasi pendapatan dari anggaran Rp1,09 triliun hanya Rp0,857 triliun atau Rp857 miliar. Jadi artinya apa, ketidakcapaian itu karena uangnya tidak ada. Karena yang anggaran-anggaran pendapatan itu sudah dianggarkan sebagai sumber pendapatan untuk dibelanjakan di tahun 2020.

Kemudian saya mensikapi tahun 2021, Kementerian KKP menganggarkan PNBP dari BLU Rp54 miliar lebih. Saya ingin mendapatkan data kalau KKP menganggarkan Rp54 miliar lebih untuk tahun 2021 seharusnya posisi pinjaman BLU di awal tahun 2021 itu minimal Rp1,8 triliun. Berapa sesungguhnya posisi BLU di awal tahun dan berapa targetnya sampai akhir tahun 2021 karena ini juga akan mempengaruhi tidak dicapainya anggaran tahun 2021.

Kemudian terkait dengan usulan tambahan anggaran Rp8 triliun. Saya tidak mempermasalahkan anggaran itu akan lebih bagus manakala semuanya orientasinya untuk memberikan ruang kehidupan bagi rakyat. Saya akan mengkajinya dari komposisi penganggaran. Di tahun 2021 anggaran dari anggaran Rp4,74 triliun itu anggaran untuk pengolahan perikanan dan kelautan Rp1,291 triliun tapi anggaran dukungan manajemen Rp2,965 triliun. Bagaimana mungkin rakyat bisa punya ruang kehidupan yang baik anggarannya hanya untuk menggerakkan roda organisasi.

2022 yang direncanakan dari anggaran Rp6,115 triliun itu untuk anggaran belanja langsung atau belanja publik untuk pengelolaan perikanan dan kelautan Rp2,123 triliun. Yang mengejutkan adalah anggaran untuk dukungan manajemennya Rp3,391 triliun. Saya mendapatkan data dari Rp3,391 triliun itu, itu sesungguhnya seharusnya itu ditempati anggaran belanja pegawai Rp1,82 triliun, operasi perkantoran Rp0,783 triliun jumlahnya Rp2,605 triliun. Dari Rp3,391 triliun ada anggaran lain di luar belanja pegawai dan belanja operasional perkantoran. Ini sesungguhnya tidak sejalan dengan arah kebijakan anggaran tahun 2022 yang disampaikan oleh Presiden pada saat pidato penyampaian nota keuangan, bahwa arah kebijakan utama anggaran 2022 adalah untuk pemulihan ekonomi dan untuk reformasi struktural. Reformasi struktural dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga itu ditengarai sesungguhnya pada rencana anggaran belanja dukungan manajemen. Mohon untuk dikaji kembali.

Kemudian yang ketiga, saya mendukung Pak Ichsan. Pak Menteri, karena dari tahun ke tahun itulah pagu indikatif yang diberikan Pemerintah bagaimana tentunya supaya anggaran itu maksimal buat rakyat benar langkahnya adalah bagaimana kita mengadakan inventarisasi mana anggaran-anggaran yang bisa dialihkan ke DAK, sehingga anggaran itu bisa maksimal untuk kepentingan rakyat yang berhubungan dengan belanja langsung di bidang KKP.

Terima kasih Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Mas Sutrisno.
Yang terakhir Abdullah Tuasikal silakan.

F-NasDem (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan Pak Kyai.

Rekan-rekan sekalian Anggota, Pak Menteri, Pak Sekjen beserta jajarannya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Saya singkat saja Pak Menteri, bahwa potensi ikan secara nasional tangkap sekitar 12 juta ton per tahun kurang lebih, tapi potensi budi daya ikan itu sekitar 100 juta ton per tahun. Yang baru dimanfaatkan 16 juta ton per tahun, lalu target kementerian itu sekitar target kurang lebih sekitar 19,47 ton per tahun. Kita memiliki potensi, potensi ini lain dengan potensi perikanan tangkap, potensi ini ada pada lingkungan masyarakat. Potensi ini harus digarap dan seperti apa yang dikata oleh teman kita Pak, bahwa dia butuh ekskavator dan lain-lain, itu baru potensi dilapangnya.

Tapi kita lihat lagi bahwa ini ada bantuan bioflok, ada bantuan-bantuan perkarangan, lalu juga bantuan-bantuan sekitar 1 juta ekor yang terdiri dari budi daya laut dan budi daya tawar. Dan setelah selesai maka benihnya itu kita

dapat dari Sulawesi, dapat dari Manado. Nanti saya mau sampaikan bahwa di Maluku inikan kita punya BP3. BP3 ini membawahi 3 provinsi, Maluku, Maluku Tenggara, dan Papua, padahal target Pak Menteri sekitar 19,47%. Apakah tidak salahnya kalau BP3 di Maluku ini bukan saja sebagai badan pelatihan dan penyuluhan tetapi juga dijadikan balai benih untuk menjembatani kontribusi untuk wilayah-wilayah kita mau kembangkan.

Untuk itu saya kira dua hari yang lalu saya ke balai dan setelah saya lihat sebenarnya di sana ada potensi, tinggal Pak Menteri menggerakkan saja Maluku atau BP3 harus mempunyai teori dan balai benih yang nantinya bisa didistribusi lebih gampang. Intinya bahwa kalau Pak Menteri punya program-program yang lain yang nanti karena refocusing, saya kira lebih saja kita menjurus untuk potensi kita siapkan bahan baku ada pada masyarakat. Jadi harapan saya untuk tahun 2022 mudah-mudahan balai-balai penyuluhan pelatihan itu juga ada harus ditingkatkan juga balai-balai pembenihan supaya bisa menjembatani, mengkontribusi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di setiap daerah, jadi itu harapan saya.

Yang terakhir Pak Menteri, tadi juga disinggung oleh Pak Ketua soal lumbung ikan nasional. Ada masyarakat yang sedikit protes saya kira adalah lingkungan yang besar seperti itu pasti ada. Yang penting sekali Pak Menteri, bisa menunjukkan kebijakan lewat sosialisasi-sosialisasi, lewat Minimas di Cidana dari kementerian. Karena dalam rapat tahun ini selama saya menjadi Anggota DPR RI saya belum melihat bahwa ada dukungan dari kementerian kepada masyarakat Maluku, mungkin juga Papua, mungkin juga Maluku Utara, dan teman-teman yang lain.

Untuk itu, untuk lumbung ikan nasional ini saya kira kita masyarakat Maluku cepat diproses regulasi Undang-Undang tentang Lumbung Ikan Nasional supaya pembangunan dia tearah karena refocusing dan lain-lain. Untuk itu harapan saya Pak Menteri, minimal di kegiatan tahun 2022 ini sedikit mewarnai lewat Kementerian Perikanan dan Kelautan agar tidak lagi ada komentar-komentar yang miring pada masyarakat. Prinsipnya kami mendukung apa yang menjadi program Pak Menteri dan harapan kita Pak Menteri benar-benar fokus, jangan kita cubit sana, cubit kemari, lalu kita tidak dapat apa-apa. Saya kira demikian Pak Ketua.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Seluruh pertanyaan dan tanggapan, serta saran telah disampaikan. Kami persilakan Pak Menteri untuk menjawab, yang pertama mungkin mengklarifikasi kenapa refocusing kok tidak pakai persetujuan. Ini penting agar supaya tidak ada dusta diantara kita, kata orang Aceh ini.

Silakan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang paling utama soal refocusing, jadi saya bisa sampaikan bahwa refocusing untuk kepentingan masyarakat tidak ada yang dirubah, itu yang pertama. Kalau soal kaget-kaget saya pun kaget-kaget Pak, pertama kali dapat surat kaget juga saya sama seperti Bapak-bapak semua. Saya panggil Pak Sekjen bagaimana ini caranya tolong didiskusikan secara informal dengan yang mulia Pimpinan Komisi IV DPR RI untuk kemudian diskusi secara unformal, kira-kira seperti itu.

Lalu kemudian waktu itu kalau tidak ada salah ada rapat para Direktur Jenderal dengan Komisi IV DPR RI, tapi tekanan saya jelas bahwa saya minta untuk yang namanya kepentingan masyarakat tidak dirubah, apapun namanya. Jadi kalau misalnya nanti kemudian diganggu saya bilang ya saya akan tetap saja caranya seperti apa dengan Menteri Keuangan. Dan *Alhamdulillah* tidak terganggu Bapak.

Kemudian masih agak sedikit terlambat saya sudah minta kepada teman-teman Eselon I untuk segera dalam 3 bulan ini bahkan kalau perlu dalam bulan depan ini harus sudah bisa selesai. Walaupun saya juga tahu prosesnya itu kayak demikian, sedemikian rupa saya sih terus terang saja ketika saya diskusi dengan Pak Irjen, "Pak Irjen gimana sih kenapa tidak digabung jadi satu langsung biar cepat selesai?" "nggak bisa Pak, aturannya nggak bisa begitu, nggak kena", aduh mati kita, jadi itu kondisinya. Jadi memang saya siap dimarahi intinya sama yang mulia semua, tapi saya akan bekerja semaksimal mungkin untuk refocusing saya nyatakan bahwa itu tidak.

Kemudian yang kedua soal anggaran. Saya mungkin jawabnya agak lompat-lompat sedikit, tapi kira-kira garis besarnya saja karena nanti kalau soal detail kami akan menjawab secara tertulis. Soal anggaran khususnya tadi Pak Trisno, saya bisa sampaikan bahwa anggaran manajemen itu gaji pegawai dan biaya operasional kantor itu maksudnya buat bayar listrik Pak, buat bayar listrik, buat bayar telepon, buat bayar surat menyurat, dan lain sebagainya itu belanja pegawainya saja sudah 1,8 dan buat bayar listrik seluruh Indonesia 783 termasuk telepon totalnya kira-kira Rp2,6 triliun. Lalu prioritas nasional itu adalah program untuk seperti PEN sebetulnya, itu kira-kira sekitar Rp2,5 triliun. Sementara prioritas KL sendiri itu hanya Rp965 miliar yang terbagi menjadi 7 direktorat.

F-PDIP (RIEZKI APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak, ini interupsi.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Silakan.

KETUA RAPAT:

Ibu Kiki.

F-PDIP (RIEZKI APRILIA, S.H., M.H.):

Ijin Pimpinan.

Pak Menteri, makanya ini berhubung Bapak bahas boleh dong kami dikasih gambaran kriteria PEN dan PN Program Nasional dan Pemulihan Ekonomi Nasional itu seperti apa sih klusterisasinya. Karena yang saya pahami kalau PN itu kan dia kaitannya dengan RPJM mau N atau apapun. Nah, saya minta tolong supaya tidak terjadi misunderstanding antara mitra dengan kami di sini.

Terima kasih Pimpinan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Baik, terima kasih Ibu.

Jadi saya minta nanti Pak Sekjen mengkoordinir untuk menjelaskan lebih detail, saya kira akan lebih baik. Saya tadinya berpikir bahwa angka itu memang sudah dibicarakan.

KETUA RAPAT:

Belum Pak, saya belum tandatangan, Ibu Anggi juga.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Baru penyampaian.

Baik, tapi ini juga belum putus karena masih indikasi. Jadi kalau namanya indikasi kan belum tentu jalan, kira-kira begitu. Lalu berikutnya soal.

KETUA RAPAT:

2021 Pak, itu belum ada persetujuan bukan yang ini. 2021 yang refocusing itu belum ada persetujuan, tadi pertanyaan teman-teman Pak TA. Khalid menuduh Pimpinan ini sudah tanda tangan. Yang 2021 refocusing.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Mungkin Pak Sekjen bisa bantu jelasin untuk yang tahun 2021.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pak Ketua, sedikit. Jadi waktu itu ada info rapat konsultasi dan itu tidak ada presentatif semua Kapoksi juga tidak semua hadir Pak.

KETUA RAPAT:

Saya belum tanda tangan.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Iya betul, memang nggak ada rapat itu Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Sekjen.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Mungkin Pak Sekjen bisa menjelaskan.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan, ijin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar dulu.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Sebentar sebelum Pak Sekjen masuk karena ini kontribusinya ada di Pak Sekjen waktu terakhir kita Rapat Dengar Pendapat kemarin. Jadi ijin Pimpinan, harus sesuai dengan Rapat Dengar Pendapat hasil kita rapat kemarin. Dan kita memang adakan kesepakatan bersama ada konsultasi antara KPP dengan Pimpinan dan juga Kapoksi tapi memang tidak terlaksana. Makanya tolong Komisi IV DPR RI menyiapkan hasil dari Rapat Dengar Pendapat kemarin juga biar Pak Menteri bisa ngerti, tahu apa hasil rapat bersama dengan Sekjen dan Eselon I kemarin.

Terima kasih Pimpinan.

F-PDIP (RIEZKI APRILIA, S.H., M.H.):

Ijin Pimpinan, dikit.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PDIP (RIEZKI APRILIA, S.H., M.H.):

Pak Menteri....

KETUA RAPAT:

Ini 2021 dulu.

F-PDIP (RIEZKI APRILIA, S.H., M.H.):

Iya kita bahas 2021Pak, jadi memang yang disampaikan teman-teman waktu itu memang ada rapat konsultasi tapi mohon koreksi teman-teman ya kalau kami salah. Jadi saya ini kok jadi mikirnya gini Pimpinan, ini internal KKP ini ada kordinasi nggak sampai kita juga bingung mereka sendiri bingung, Menteriya saja nggak tahu, Sekjenya juga nggak tahu. Itu saja sih saya mau garis bawah.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebenarnya Pak Menteriya nggak bingung, karena ini urusan teknis kan Sekjen. Silakan Pak Sekjen mengklarifikasi kenapa kok tidak pakai mekanisme sebagaimana Tusinya DPR RI, inikan anggaran belum ditanda tangan kok sudah melakukan aksi itu pertanyaan.

Silakan Pak Sekjen.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum.):

Terima kasih.

Mohon maaf sebelumnya, jadi refocusing keempat kami langsung rapat. Saya ingat sekali itu semuanya dari Eselon I, Eselon II kami libatkan, Irjen juga semua, Irwilnya juga ikut. Ada beberapa konsultasi saya tidak perlu saya sebutkan pakai WA ke Komisi IV DPR RI. Kami ingin menghidupkan yang kemarin sebelumnya yang ditayangkan itu kan sangat menyakitkan sebelumnya saya rapat itu ada bioflok hanya tinggal 18 ke 38, kalau dibagi semuanya pun tidak mungkin kebagi. Nah, ini sekarang mungkin salah saya tidak lapor, tidak menyampaikan persetujuan. Tapi yang kami kerjakan untuk refocusing itu semuanya itu berpihak sekarang ini malah dihidupkan. Misalkan bioflok yang harusnya 38 sekarang menjadi 250, semuanya dapat.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Koreksi, interupsi Pak.

Jadi yang sebelumnya 400 sekian jadi 30 sekian, ketika kemudian terjadi rapat konsultasi sebagian yang hadir itu protes Pak, jadi begitu ceritanya ya bukan dikembalikan jadi tinggi lagi. Mohon maaf ini.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Sebelumnya 38 jadi 38 lalu kami rapatkan sekarang jadi 250.

KETUA RAPAT:

Awal 400, draft tertulis setelah Rakor menjadi 200 sekian karena pengaruh refocusing. Apa kira-kira gitu?

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Lalu kami rapat di sini saya mimpin kebetulan saya mimpin, terus jadi 38 dibagi satu orang pun tidak mungkin. Nah, lalu dapat....

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Inikan pembicaraan itu kita itu ada bertahap, ada yang rapat konsultasi, ada yang rapat mengambil keputusan rapat. Kalau menurut saya ini break down sebentar, cukup 10 menit terbatas dibicarakan di dalam untuk menghargai semua pihak.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Kalau kami berusaha semuanya rapat itu yang kemarin sebelumnya yang ini, sebelumnya tidak ada sekarang dihidupkan kembali, rata-rata dihidupkan kembali. Ada yang kemarin sedikit, misalkan bantuan ikan yang saya tahu ada berapa juta gitu ditambah. Lalu ada jaring atau apa itu banyak yang akhirnya sampai habis itu kayak tadi Ibu sampaikan perjalanan dinas saya coret semua itu, pengadaan-pengadaan kapal apa semua dicoret. Itu yang kami laksanakan, lalu sekarang kami rapat ini tentang anggaran hasil refocusing. Dan saya setuju tadi usulan untuk kita rapat untuk diperdalam lagi. Mungkin itu Pak Ketua.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Saya mungkin tambahkan Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Menteri.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Apabila ini mohon maaf saya yang salah barangkali karena saya pikir rapat konsultasi yang dilakukan oleh Eselon I yang dipimpin oleh Bapak Sekjen itu sudah selesai. Jadi ternyata kalau memang itu dianggap belum selesai khususnya terhadap refocusing yang pasti kami memang tidak bisa apa-apa refocusing. Tapi kalau memang kemudian diperlukan lagi pendalaman dan lain sebagainya saya siap saja. Artinya, mungkin dengan pertemuan terbatas antara Pimpinan barangkali, kemudian kita bicarakan lagi khusus refocusing 2021. Tapi yang pasti saya memang meminta kepada Pak Sekjen agar program yang itu karena kepentingannya adalah untuk masyarakat itu harus dijalankan dengan apapun. Kalau perlu kita tidak ada lagi perjalanan dinas, tidak apapun memang sudah tidak ada, tapi kalau gaji nggak mungkin Pimpinan.

F-PDIP (RIEZKI APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar dulu biar selesai dulu Ibu Kiki.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Jadi saya kira kalau memang perlu itu saya siap saja untuk dilakukan mungkin dalam beberapa hari ke depan untuk kita selesaikan urusan 2021 ini supaya tidak ada ganjelan juga diantara kita dengan para Anggota Dewan yang terhormat.

Saya kira demikian.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Interupsi Pimpinan, Pak Suhardi.

KETUA RAPAT:

Oh, Pak Suhardi.

Sebentar interupsi yang pertama Ibu Kiki tadi. Ini kalau nggak diberi silakan Ibu Kiki. Tadi penjelasan Pak Menteri perlu saya tegaskan bahwa beliau ini komitmen sudah akan dan sudah minta maaf atas keteledorannya dan silakan besok kita jadwal Rakor terbatas untuk membahas refofusing dan sekaligus kita tanda tangan manakala sudah disetujui, itu harus jangan terlewatkan nanti melangkahi, mengangskangi Komisi IV DPR RI nanti.

Silakan Ibu Kiki.

F-PDIP (RIEZKI APRILIA, S.H., M.H.):

Terima kasih Pak Kyai yang baik hati.

Saya apresiasi Bapak barusan menyatakan bahwa ini tanggungjawab Bapak. Saya berterima kasih juga Pimpinan memfasilitasi bahwa di Komisi IV DPR RI ini ada Pimpinan Komisi juga diwaliki oleh beberapa Fraksi yang harus terinformasi dengan baik.

Kemudian tolong juga kementerian kalau memang kita ini mitra, kalau memang ada hal-hal terkait tenggat waktu jangan sampai direfocusing mungkin ada strategi dari kementerian terkait apa tadi bilang CPCL atau apa untuk segera didorong mungkin supaya Bapak-bapak kerjanya juga maksimal. Jadi jangan nanti kejar-kejaran CPCL mana dan segala macam, karena belum tentu semua yang disampaikan oleh staf kami maksimal.

Jadi saya harap Pimpinan, Bapak Menteri juga merapatlah ke Komisi IV DPR RI itu bukan hanya dengan sekedar Pimpinan saja biar nggak seuzon juga kita, di sini juga ada perwakilan fraksi-fraksi yang memang harus juga dikoordinasikan. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Kiki, sudah saya catat dengan baik.
Kami persilakan Bapak Suhardi setelah itu Pak TA.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Refocusing adalah kemutlakan akibat COVID-19 dan kita juga memahami bahwa refocusing pasti ada pengurangan, hanya kita kurang sama-sama. Kita sepakat ini dikurang, kalau sepihak ya dikurangi kita tidak tahu itu yang tidak benar. Tapi Pak Menteri tadi sudah menyampaikan dan Bapak Pimpinan juga sudah ingin menjadwalkan saya setuju.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak TA. Khalid.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Sebenarnya itu yang inginkan, cuma begini ya sehingga saya sepakat dengan Pak sampaikan biar tidak ada dusta, biar tidak ada curiga, ini rasa menjadi problem karena rasa curiga ini. Jadi lebih bagus saya pikir perlu jadwal khusus untuk ini, sebenarnya banyak hal yang bisa kita selesaikan dengan kebersamaan. Saya pikir demikian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Ketua, ijin Ketua, Ichsan Firdaus sebelah kiri Ketua.

KETUA RAPAT:

Siapa ini.

F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Sebelah kiri.

KETUA RAPAT:

Oh iya, Ichsan jangan mengulang lagi coba.

F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Nggak.

KETUA RAPAT:

Ya silakan penegasan.

F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Kita perlu begini, saya refocusing kita ini selalu dilakukan pada saat kita reses dan itu selalu tiap tahun begitu. Makanya kemudian saya kita perlu sepakati di dalam rapat bagaimana mekanismenya. Tidak mungkin refocusing itu terjadi pada saat kita masa sidang, kalau kita lihat *pattern*-nya hampir 5 tahun terakhir ini memang selalu refocusing itu selalu dilakukan di masa reses. Saya nggak tahu apakah memang itu kebetulan atau *by design* saya nggak paham.

Tetapi maksud saya adalah karena di tengah reses seperti ini memang harus diatur mekanismenya, apakah kemudian cukup diserahkan kepada Pimpinan atau ada rapat konsultasi. Sekarang rapat konsultasi dalam reses itu harus ijin, ijin dengan Pimpinan DPR RI. Kalau memang secara informal kita serahkan sama Pimpinan, ini kesepakatan saja artinya bukan tertulis ini tapi *gentlemen agreement* saja antara kita sama mitra dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, bukan hanya KKP maksud saya semuanya.

Kita sepakat karena kita disinikan ada meja Pimpinan, nah Pimpinan apakah mau diserahkan apakah kemudian Pimpinan nanti mau melibatkan masing-masing Poksi ya silakan saja tapi mekanisme itu harus kita sama-sama sepakati, karena selalu setiap reses refocusing kita ini. Setiap reses selalu refocusing, saya khawatir nanti pas reses kita di Oktober ada refocusing lagi ini, dengar-dengar kabar katanya ada refocusing lagi. Dan selalu dilakukan pada saat reses, selalu. Kecurigaan saya adalah kita kehilangan komunikasi,

makanya betul kata teman-teman tadi ada komunikasi. Tapi apakah komunikasi lewat Pimpinan atau melibatkan Poksi, silakan teman-teman Pimpinan atau kepada Pimpinan itu untuk melibatkan Poksi atau tidak itu artinya tidak ada aturan secara tertulis sebenarnya.

Tapi kalau memang Pimpinan mau memberikan ruang buat Kapoksi ya itukan kemurahan hatinya Pimpinan. Itu maksud saya, saya ingin meluruskan saja, tidak ada mekanismenya, tetapi refocusing ini selalu dilakukan setiap reses dan ini tidak ada *pattern*-nya, ini persoalan etik saja. Bahwa kemudian ada persetujuan iya saya sepakat dengan Bapak Suhardi, tapi mekanismenya melibatkan itu silakan kita bicarakan nanti di Rapat Internal, apakah setiap refocusing harus melibatkan Kapoksi atau tidak. Saya cuma nanya itu saja sebenarnya, tidak ada rumusnya itu.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.
Silakan dilanjut Pak Menteri.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pak, sedikit bisa.

KETUA RAPAT:

Oh ada, silakan Pak Dokter Slamet.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Jadi saya hanya menggarisbawahi saja ini ada mekanisme yang memang tidak saling dipahami. Saya waktu itu memang hadir, saya juga sepakat dengan Pak Ichsan tidak ada aturannya. Tetapi waktu itu judul dari pertemuan saat itu adalah rapat konsultasi, hanya beberapa orang yang hadir karena memang kondisional masih PPKM dan menjelang reses, kan seperti. Sehingga baik dari Kementan maupun KKP tidak ada kesimpulan rapat. Nah, ini informasi kepada Bapak Ketua, sehingga itu tidak bisa menjadikan dasar untuk dilakukan refocusing. Oleh karena itu, sebenarnya saya secara pribadi juga heran kenapa hari ini sudah Rapat Kerja padahal pembahasan yang lain belum. Itu saja Pimpinan informasi dari kami.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.
Silakan Pak Menteri, sudah tidak ada interupsi lagi.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Terima kasih atas pemahamannya dari seluruh yang mulia Anggota Dewan. Saya lanjutkan sebenarnya kalau merasa refocusing ini adalah belum final, saya kira tadi saya sudah terbuka untuk kemudian kapan pun diundang untuk kemudian kita bicara khusus.

Saya akan lanjutkan beberapa yang menjadi perhatian dari Bapak-Ibu semua, diantaranya adalah adanya beberapa hal terhadap misalnya ada pendangkalan muara, kemudian pelabuhan dan sebagainya yang sudah lama disampaikan dan sampai hari ini belum. Terus terang saya di internal bekerja keras ya bagaimana caranya anggarannya tidak ada yang ada juga difocusing bahkan sampai. Jadi akhirnya saya mencoba untuk bagaimana kira-kira di 2022, tapi 2022 dengan pagu indikatif juga yang sangat mepet akhirnya saya pikir sudah kalau gitu bagaimana caranya kalau kita minta kepada Bappenas agar diprogramkan khusus misalnya, diantaranya adalah pengajuan tambahan dan lain sebagainya.

Itu yang akan usaha-usaha dan usaha lain tentunya tapi saya kira itu karena belum jadi saya tidak bisa mengingatkan. Tapi itulah yang menjadi perhatian saya, saya ini keliling juga Pak, jadi ke pantai utara saja itu ada yang pelabuhannya sudah ambruk, sudah kasihan. Itu salah satu yang menjadi perhatian penting juga seharusnya untuk kita kerjakan. Tapi *Insy Allah* saya akan *all out* tapi selalu akan diskusi dengan Pak Khalid tentu karena ini menjadi perhatian beliau.

Kemudian soal PNBP. Jadi PNBP ini adalah ketika saya ada rapat kordinasi soal tentang hukum di Bandung kita ngundang beberapa kementerian salah satunya dari Kementerian Keuangan. Di situ disampaikan bahwa kontribusi PDB jadi pemikiran saya masih kinerja dari kementerian itu adalah dari kontribusi PDB kementerian itu berapa besar. Nah, KKP itu Rp450-an triliun PDB tetapi PNBP-nya Rp600 miliar. Lalu kemudian dibandingkan Kementerian KLHK PDB kontribusinya cuma Rp100 triliun tetapi PNBP-nya Rp4 triliun. Di situ saya terus kemudian dengan kementerian SDA yang lainnya, saya jadi terus merasa bahwa kalau demikian berarti masalahnya memang harus ... ini. Kalau begitu itulah kenapa kemudian memperkuat dari pemikiran saya ketika pertama kali saya ada diruangan ini bahwa bagaimana sumber daya alam perikanan tangkap ini kemudian ini di-*monetize* dengan baik. Kalau kami harus kemudian harus membantu bagaimana nelayan ini *survive* dan bagaimana nelayan ini menjadi lebih sejahtera tentu harus dicarikan upaya-upaya.

Nah, di tengah di zona ekonomi eksklusif katakan di tengah itu ada nelayan-nelayan yang levelnya sudah tinggi di atas 30 GT. Kalau di atas 30 GT dia cuma bayar ijin saja misalnya, kecil bayar ijin mau melaut kan kecil sekali dapatnya kira-kira Rp600 miliar itu. Uang ini nggak bisa buat membantu 2,5 juta nelayan kecil. Jadi caranya adalah kita buat modeling gimana kalau misalnya pengelolaan penangkapan ikan itu karena kita juga didesak oleh internasional soal jangan sampai terjadi *over fishing*, jangan sampai laut itu tidak sehat. Nah, itu yang kita sebut dengan pengelolaan perikanan terukur.

Nah, itu nanti kita akan sampaikan kepada para Anggota Dewan yang terhormat model ini bentuk desainnya seperti apa. Terus terang sampai hari ini belum final.

Nah, hasilnya kalau itu dilakukan contohnya ini sekaligus menjawab lumbung ikan nasional di Maluku. Di Maluku itu kita hitung Ambon itu ada Kota Ambon, ada Tual, ada Saumlaki, kemudian Benjina, Dobo, lalu kemudian di sebelah sananya lagi Laut Arafura itu ada Merauke, Mimika, kemudian Sorong, saya hafal sampai 8 pelabuhan. Yang benar-benar hidup pelabuhan itu di mana? Hampir nggak ada Pak. Jadi saya pergi ke sana dangkal semua, bahkan nggak ada kapal di situ, jadi kalau ada nelayan-nelayan tradisional. Pas saya datang ada satu, dua nelayan tradisional.

Nah, kemana ini ikannya? Ya kepada Jawa. Kemudian dengan model pengelolaan terukur itu kita lakukan siskamling. Nah, sekaligus saya perkenalkan ini di tengah-tengah saya sekarang sudah memiliki Direktur Jenderal baru beliau berasal dari Angkatan Laut namanya Pak Hadin. Jadi kalau dari Angkatan Laut pemikirannya saya agak berani gitu Pak. Saya minta coba Pak Hadin ini Pak Direktur Jenderal baru Pak, baru dilantik minggu lalu, Direktur Jenderal PSDKP. Karena itu nanti yang akan melakukan siskamling itu, Siskamling di setiap wilayah pengelolaan. Nah, kalau itu dilakukan akan ada putaran uang Rp47,5 triliun di 8 pelabuhan ini. Dan akan ada kebutuhan tenaga kerja tidak kurang dari 6.000 tenaga kerja. Jadi kalau ini nanti disetujui oleh Anggota Dewan untuk kemudian kita jalankan kita akan mendapatkan PNBPN di wilayah itu saja Arafura itu Rp3,7 triliun ini menurut perhitungan. Nah, kalau Rp3,7 triliun itu kemudian kita di-flow misalnya antara pusat dengan daerah itukan berarti cuma 3 provinsi, jadi Provinsi Maluku, Provinsi Papua, dan kemudian Papua Barat. Nah, ini akan cukup bagus.

Nah, lalu bagaimana dengan soal NTN, NTN itu juga saya mikirnya lama Ibu, 24 jam nggak cukup ternyata. Jadi nilai tukar nelayan itukan investasi si nelayan ditambah dengan penghasilannya dibagi dengan biaya modal dan kemudian *spending life* nelayan. Jadi kalau itu saya hitung terus paling tinggi itu di angka 101, 102, ya seumur-umur miskin terus dia tidak akan pernah kaya. Jadi apa yang harus dikurangi? Maka faktor investasi dirinya harus dibuang kalau bisa. Sehingga kemudian kalau pendapatannya itu yang dilakukan lalu hanya dikurangi dengan *spending life*-nya tadi. Kalau itu maka nilai tukar si nelayan atau pembudi daya kita sudah hitung-hitung dia akan naik di atas 140%. Itu dia sejahtera dan memiliki tabungan, nah nanti saya akan mencoba untuk diskusi kemudian kita akan konsultasi apakah teori ini bisa diterapkan dan boleh dijalankan.

Nah, salah satunya Pak Slamet yang tadi Pak Slamet mempertanyakan soal *shrimp estate* kemudian saya ganti menjadi modeling pembudi daya tambak udang. Sebenarnya itu salah satu model Pak, salah satu model yang bertambak itu adalah masyarakat tapi dia dikurangi, dia tidak perlu lagi *spending* atau mengeluarkan modal, nah itu salah satu. Nah, dengan demikian dia akan mendapatkan *income*, jadi *income*-nya adalah *fresh income* ditambah dengan prestasi. Jadi model ini kalau bisa dijalankan dengan baik nanti kemudian akan lebih bagus untuk wilayah-wilayah lain. Sama seperti juga di

Kampung Semen, Kampung Semen itu ada 668 kepala keluarga yang pendapatannya itu Rp3 juta sampai Rp5 juta per bulan, itu dari budi daya. Model-model ini akan kita kembangkan karena ada instalmen BLU di situ dan ada pembinaan. Itu salah satu sehingga bagaimana untuk meningkatkan nilai tukar nelayan, nilai tukar pembudidaya ikan, itulah maknanya di dalam program kami ada kampung-kampung budi daya kearifan lokal. Intinya di situ kearifan lokal adalah pengentasan kemiskinan dan kemudian mengantisipasi kepunahan jenis-jenis ikan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

F-PDIP (RIEZKI APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Atau selesai dulu, ini barusan masih koma belum titik Pak Menteri. Ntar dulu Ibu Kiki.

F-PDIP (RIEZKI APRILIA, S.H., M.H.):

Sedikit saja Pimpinan, karena anggarannya luar biasa Pimpinan, mohon ijin Pimpinan. Dari awal Komisi IV DPR RI mempertanyakan masalah shrimp estate dengan angka Rp250 miliar yang belum pernah disajikan secara konkrit hulu-hilirnya, lokasi di mana, siapa yang beli, berapa banyak masyarakat yang dilibatkan. Ini bukan hanya dengan KKP tetapi juga dengan kementerian lainnya yang mempunyai program kurang lebih sejenis kami minta kejelasan dulu. Karena Rp250 miliar apabila tadi yang disampaikan oleh teman-teman bisa konkrit yang tadi Bapak bicara PEN dan PN itu tadi kan kita bisa. Karena pemulihan ekonomi nasional dengan program padat karya apakah *shrimp estate* ini juga demikian, jangan *business to business* karena negara kan tidak boleh berbisnis dengan masyarakatnya Pak.

Terima kasih.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Baik, terima kasih Ibu.

Jadi sebenarnya kita kan berusaha mencari satu pola dan ini bukan *business to business* tapi saya melihat bahwa banyak sekali *spending* negara yang dibutuhkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, tapi kemudian habis begitu saja. Tadikan ada juga ungkapan dari beberapa Anggota Dewan mengatakan banyak proyek yang, ada banyak pekerjaan yang terbengkalai, dan lain sebagainya. Nah, ini kami mencoba.

Namun demikian inikan belum dieksekusi jadi tidak perlu khawatir kalau nanti kemudian Anggota Dewan tidak setuju terhadap program ini ya tidak apa-apa kita tidak jadi jalankan. Tapi yang pasti kita ingin menyampaikan, kalau kami tidak sampaikan di sini nanti jadi lebih kacau lagi kalau tiba-tiba ada, kan kira-kira begitu. Jadi yang kita sampaikan di sini adalah sebuah program dari indikasi tahun 2022, tapi model itu yang diinginkan itu adalah kita punya harapan bahwa masyarakat yang berbudidaya di atasnya itu dia akan memiliki satu

tingkat pendapatan yang kemudian menjadi optimum. Nah, itu salah satunya dan kemudian beberapa hal lain juga. Saya kira itu.

Kemudian yang ketiga tentang pergaraman. Pergaraman ini....

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Kyai Hasan saya boleh interupsi.

KETUA RAPAT:

Tema baru atau yang telah dijelaskan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Yang telah dijelaskan tetapi menurut saya, saya perlu bicara.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih Pak Kyai.

Pak Menteri, sebenarnya *positioning* Komisi IV DPR RI itu tidak langsung menolak atau tidak menerima kegiatan yang Bapak mau sampaikan. Tetapi kami tidak bisa hanya menyetujui berdasarkan penjelasan Bapak seperti yang ini Pak, ada begini, ada masyarakat begini, kami nggak bisa Pak. Yang diminta oleh Ibu Kiki tadi adalah penjelasan yang secara komprehensif dan detail Pak, dalam bentuk konsep. Sehingga kami juga bisa melihat dengan alokasi anggaran Rp250 miliar lokasinya di mana, apa yang mau dilakukan, implikasinya kira-kira seperti apa, siapa yang mau dilibatkan. Karena hal seperti ini juga kami tanyakan kepada Kementerian Pertanian dalam kasus misalnya *Food Estate* disejumlah wilayah Pak.

Nah, jadi kalau Bapak bilang ya terserah Komisi IV DPR RI kalau Komisi IV DPR RI tidak setuju ya tidak usah dijalankan. Mohon maaf Pak, kalau seperti itu kami melihat ada kurang serius Pak. Tapi kalau Bapak merasa punya konsep Bapak harus mensosialisasikan kami Pak, dengan argumentasi data dan konsep yang jelas Pak, dan kami juga siap untuk mendukung Bapak. Tapi kalau ini tidak ada Pak, bagaimana kami bisa memberikan persetujuan Pak.

Nah, itu terus terang Pak saya nggak mau nanti ditangkap seolah-olah Komisi IV DPR RI tidak mendukung Bapak, karena padahal Bapak punya niat yang baik. Kami butuh melihat itu secara jelas, kira-kira begitu Pak, jangan sampai salah pengertian Pak.

Terima kasih Pak.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Terima kasih.

Secara detail pasti kami akan sampaikan, bahkan kalau perlu kita diskusi ketat soal itu. Tapi harus di dalam satu forum yang agak sedikit berbeda, jadi bukan di dalam Rapat Kerja saya kira. Jadi disebutnya mungkin saya nggak tahu Pimpinan, apakah itu rapat konsultasi atau apa saya kepengen saya presentasi langsung.

KETUA RAPAT:

Nanti FGD Pak.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Ya atau FGD misalnya gitu, dan itu memang akan kami lakukan Pak. Jadi kalau di Rapat Kerja itu sifatnya saya menyampaikan adalah program-program yang akan kami jalankan nanti di 2022. Tapi apakah itu sudah final? Belum. Kenapa belum final? Karena saya masih mau mengejar yang namanya refocusing dalam 3 bulan, karena waktunya bukan 4 bulan tapi 3 bulan karena 15 Desember itu sudah final, ini kita kerjakan. Tapi diantaranya itu tentu kita akan lakukan *focus discussion group* kalau itu misalnya dilakukan atau konsultasi barangkali nah itu yang saya harapkan. Dalam diskusi itu akan saya jelaskan fakta-faktanya dan bagaimana kita harus membangun Indonesia. Kalau ini kemudian nanti menjadi apa namanya menjadi hal yang kalau saya terus terang Pak, model itulah yang bisa jalan kalau nggak jangan di forum ini saya jelaskannya, di forum khusus saja yang lebih enak karena bisa lebih terbuka ngomongnya, ini direkam jadi nggak enak.

F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Ketua, ijin Ketua.
Saya boleh sedikit saja.

KETUA RAPAT:

Silakan, semenit saja Mas Ichsan biar nggak lama-lama ini.

F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Saya terima satu menit walaupun tadi teman-teman ada yang tiga menit, saya terimalah perintah Bapak.

Pak Menteri, saya setuju kalau kemudian ini kita FGD-kan, karena pengalaman saya kebetulan saya ini jelek-jelek begini sarjana perikanan, sedikit saja gitu. Tapi saya bisa memahami itu tapi saya setuju dengan Pak Meteri tadi bahwa kita harus ada pendalaman, tapi mungkin ruang Rapat Kerja ini terbatas sebenarnya. Saya setuju kalau kemudian kita coba perdalam bagaimana sebenarnya sesungguhnya seperti apa pengelolaan modeling ini. Tadikan saya sudah sampaikan kalau modeling saya setuju tapi kemudian

nanti bagaimana *impact*-nya kepada nanti di tahun selanjutnya pembangunan ini. Bahwa modeling ini kemudian seperti apa saya hanya berharap modeling ini cukup sekali tapi kemudian nanti itu nanti kita coba bagaimana pengembangan ke daerah dengan baik. Saya setuju kalau di ruang ini sebenarnya tidak terlalu cukup waktu untuk melakukan ini tapi saya cuma mengingatkan.

KETUA RAPAT:

Sudah disetujui tadi.

F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Iya, tapi saya ingatkan saja bahwa keputusan kita Rapat Kerja ini nanti di akhir September. Jadi harus cepat ini kita ambil keputusan di akhir September ini kan anggaran 2022 sudah harus kita ketuk palu itu di awal Oktober atau di akhir September sebelum reses. Itu saja saya hanya mengingatkan masalah *time line* saja Pak Menteri.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Sudah sepakat yang teknis detailnya nanti di FGD, beliau sudah mengiyakan atas usulan kita. Sudah tidak usah ditanya lagi, kan gitu Pak Menteri.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Biar yakin.

KETUA RAPAT:

Kiki mau lagi?

F-PDIP (RIEZKI APRILIA, S.H., M.H.):

Dikit saja.

KETUA RAPAT:

Atau garam dulu biar *clear*.

F-PDIP (RIEZKI APRILIA, S.H., M.H.):

Sedikit saja Pak.

KETUA RAPAT:

PN lagi dan PEN?

F-PDIP (RIEZKI APRILIA, S.H., M.H.):

Bukan ini *Shrimp Estate* tadi Pak, karena saya sudah *Food Estate* saya komentari dan sekarang ini *Shrimp Estate*. Coba mungkin okelah nggak mau pakai istilah *Shrimp Estate* model tambak udang. Coba dikasih opsi juga tambak-tambak udang yang eksisting ini mau diapain, gitu loh. Nanti Bapak bikin model tambak udang yang eksisting mati semua sama saja Pak, jadi tidak ada judulnya menyelematkan masyarakat kecil juga. Itu saja saya minta tolong kalau mau FGD tolong dikasih opsi, itu saja opsi a, b, c.

Terima kasih Pimpinan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Ibu, nanti di FGD sekaligus saya bahas soal itu, nanti saya sampaikan juga fakta terhadap eksisting, makanya saya sampaikan kepada Direktur Jenderal saya. Dalam *policy* kita untuk buat *policy* itu ada 3, evaluasi, revitalisasi, dan model. Evaluasi terhadap yang ada tambak kita ini sudah terus terang yang rakyat produktifitasnya 0 koma, *event* 1 ton saja nggak ada 0,6. Bayangin bisa apa kalau 0,6 padahal *best practice*-nya itu 40 ton per hektar. Jadi kalau cuma 0,6 ya nggak bisa apa-apa sementara pasar udang itu ada 24,5 miliar Dolar. Ya kita harus ambil itu, gitu maksud saya supaya kita hebatlah kira-kira. Jadi nanti kita diskusi ya Ibu, kita diskusi dalam FGD.

Yang terakhir, saya lanjut ya Pak.

KETUA RAPAT:

Lanjut garam sudah, topiknya garam.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Garam tadi saya terima kasih dengan Pak Mindo abang saya, luar biasa beliau sangat memahami situasi pergaraman. Bahwasanya memang itu Belanda itu sudah membuat satu pemetaan soal di mana sebetulnya layakanya produksi garam itu. Jadi kalau jamannya beliau itu yang paling tepat itu adalah di Madura karena itu tingkat panasnya dan lain sebagainya itu. Yang lebih hebat lagi sebenarnya di NTT, tapi kalau di NTT tidak ada petaninya sehingga itu menjadi domainnya PT Garam saya kira yang menurut saya PT Garam sudah melakukan itu.

Tapi kalau yang menjadi tugas kami di beberapa tempat seperti yang dikerjakan oleh petambak garam, petani garam, kita sudah melakukan satu juga uji coba seperti di daerah Kebumen itu dibuat garam yang dengan teknologi yang sedikit modern dan bisa mencapai produksi yang cukup bagus sampai NaCl-nya 95 kalau nggak salah.

Lalu kemudian di pantai utara, kalau mau jujur mau diapain juga ini pantai utara nggak bisa Pak. Sekali waktu mungkin Pak Anggota Dewan jalan daerah Brebes kemudian kita lihat nggak bisa, memang kualitas airnya kurang bagus dan seterusnya. Maka yang kita buat di situ dibuat, dan agak lumayan

tetapi tidak bisa maksimal, itu yang kita hadapi. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan.

KETUA RAPAT:

Target Pak Menteri ini tadi agak keberatan penjelasan di NTT tidak ada pekerjaannya, kan itukan. Sebenarnya bisa Pak, kalau target Pak Menteri mau mengambil *sample* nanti untuk *pilot*-nya untuk garam ini target Pak Menteri ingin membangun kekuatan rakyat tentang garam. Jawa Timur dulu dan NTT gitu, jangan menyebar kemana-mana. Fokus dan kita langsung melihat akhirnya.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Di NTT sekarang ini sudah dikerjakan oleh PT Garam Pak. Jadi mumpung ada PT. Garam di sini barangkali yang bisa mewakili silakan PT Garam melihatkan programnya.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.
Ibu Endang.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS., M.Sc.):

Ya satu menit saja Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS., M.Sc.):

Cirebon tadi Pak, karena saya dibesarkan di Cirebon Pelabuhan Kejawanan itu dulu penghasil garam, tapi sekarang tidak lagi. Yang kedua tentang legalitas tanah Pak, yang selalu saya kemukakan itu bikin resah masyarakat karena dikuasai oleh.

Terima kasih Pak.

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):

Pak Ketua, sebentar. Sini Pak Ketua, kiri sedikit saja.

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak Menteri tunggu dulu ada tiga ini dari NTB juga, silakan Aceh dulu.

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):

Terima kasih.

Ini mungkin Pak Menteri harus jawab, ini karena aspirasi masyarakat Aceh berkaitan 32 nelayan. Ini sejauhmana sudah, karena waktu itukan kita bareng-bareng inikan juga jadi beban saya juga.

KETUA RAPAT:

Ini garam atau persoalan lain.

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):

Ini persoalan pertanyaan saya belum dijawab oleh Pak Menteri tadi terkait dengan 32 nelayan, kalau garam sudah *clear*.

KETUA RAPAT:

Ini garam dulu, lain-lain nanti.
Silakan garam, Pak Johan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Terima kasih Pak Ketua.

Ini persoalan garam kan sudah berapa kali kita angkat. Jadi bukan tidak ada petani Pak, yang ada itu adalah garam rakyat itu tidak diserap. Saya sudah bilang bahkan memberikan *challenge* kepada Kementerian. Kalau misalnya kita kurang NaCl petani garam kalau di Dapil saya itu ada di Bima, ada di Sumbawa. Mereka bilang kepada saya bahwa berapa sih NaCl yang diminta Pak, kami siap buat asal diserap. Jadi persoalan garam itu bukan persoalan tidak ada petaninya. Jadi garam kita ini tidak diserap, PT Garam ada di situ, di Bima, di Pulau Sumbawa, sama di Pelabuhan Bontong, kami punya 3 sentar garam di Dapil saya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak PN tolong nanti jelaskan juga kebutuhan industry itu berapa sih. Ini saya lah bukan teman-teman awam kebutuhan industry berapa, kebutuhan rakyat itu berapa yang beryodium. Selama inikan kita tidak tahu, tahunya ada impor untuk kebutuhan industry, kan itu.

Silakan Pak.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Pimpinan, mungkin saya mau sedikit sampaikan bahwa tugasnya KKP pastikan membina para petani untuk kemudian dia bisa membuat produk dengan kualitas yang bisa diterima oleh industry, itu menjadi domain kami. Tapi kalau untuk kemudian besarnya industry dan penyerapannya saya kira itu

saya minta PT. Garam karena itu wilayahnya Kementerian BUMN Pak. Mohon ijin Pak, nanti saya salah.

KETUA RAPAT:

Kalau KKP kan memproduksi.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Membina petani garam, supaya produksinya bisa bagus.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Direktur Utama, wakil rakyat ingin dengar sampai kapan sih tidak impor. Dengan makan garam sendiri rakyat tidak akan matilah atau dicoba kita dulu yang makan garamnya rakyat, kan itukan.

DIREKTUR OPERASI DAN PENGEMBANGAN PT GARAM (ARIF HAENDRA):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mohon ijin Pak, terima kasih atas kesempatannya.

Terkait garam dapat kami sampaikan Pak, permasalahan utama saat ini adalah kesulitan apabila garam lokal selalu dipertandingkan melawan garam impor. Karena apa? Garam impor dari Australia hari ini, itu disampaikan harganya adalah 30 Dolar CIF dengan fred cost 20 Dolar. Jadi harga bahan baku FOP di Australia kira-kira 10 Dolar. Artinya, kira-kira Rp150 hari ini. Nah, dengan Rp150 ini dapat kami *break down* angkanya. Hari ini kalau kita beli garam di petani di tambak itu harganya Rp300 penenan.

Kemudian di Madura petani itu harus mengantongi di ladang membawa ke pinggir tempat truk yang kira-kira jaraknya 500 sampai 1 kilo meter itu harganya sudah Rp600 Pak, kalau kita beli di pinggir jalan yang siap naek ke truk. Ini memang problem besar infrastruktur yang pertama, jadi Rp300 biaya itu dipakai sepeda atau pakai ojek gitu Pak. Kayak Valentino Rossi itu kira-kira biayanya Rp300, ini yang pertama Pak. Jadi memang sulit kalau kita harus dipertandingkan melawan garam impor.

Kemudian yang kedua, terkait PP Nomor 27 Tahun 2021 Pak, kita berterima kasih terkait penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Di PP ini Pasal 284 angka 5 itu menyebutkan terkait garam konsumsi dan garam non konsumsi Pak. Kami sangat berterima kasih Pak, ada terminology ini sehingga Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 88 Tahun 2014 yang diatur sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 itu mesti direvisi Pak. Jadi terminology garam konsumsi dan garam industri itu mesti diubah menjadi garam konsumsi dan garam non konsumsi. Sehingga industry aneka pangan itu harus jelas dimakan atau tidak, kalau industri aneka pangan tidak dimakan silakan masuk ke industri, kalau dimakan itu yang masuk garam konsumsi.

Sehingga bea masuk saat ini bea masuk untuk garam bahan baku yang diimpor itu adalah 0% sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2017.

Kami sampaikan Pak, kami PT. Garam berharap ada *affirmative policy* terkait perpajakan ini. Mengapa? Karena kami PT. Garam juga masih membayar pajak-pajak itu *full* Pak, tidak ada kelebihan apapun. Sedangkan yang impor hanya 4 orang direktur pembelian satpam dan sekretaris sudah bisa mengimpor 200 ribu ton, kan gitu. Nah, ini memang kami mohon dukungan terkait hal ini supaya kita bisa bersaing secara adil.

Kemudian terkait NaCl dapat kami sampaikan, saat ini aturan SNI yang ada itu *over* untuk aneka pangan. Kalau kita lihat *un user* yang besar-besar kalau kita tanya dia butuh NaCl 97% dan kami sanggup, karena itu adalah garam yang diproses Pak, garam yang bahan baku kemudian di proses di pabrik. Sehingga sebenarnya garam kualitas apapun bisa diproses menjadi 97,5 tersebut, masalahnya harganya. Kalau dipertandingkan sekali lagi melawan impor yang harganya Rp450 CIF di Surabaya, Jakarta, atau Medan kemudian dia proses dia bisa menjual itu Rp1.100, Rp1.200 sudah bisa. Nah, ini yang garam lokal harga belinya nanti susut 30% nanti masih ada biaya-biaya proses yang lain, sehingga HPP-nya tidak akan kurang dari Rp1.500 atau Rp1.600, inilah yang terjadi Pak

Kalau kita diminta untuk harga sama dengan impor memang berat. Kemudian standar SNI di Indonesia itu memang lebih tinggi dari codex. Codex itu tidak mensyaratkan kadar kalsium dan magnesium untuk garam aneka pangan. Karena apa? Kalsium dan magnesium itu adalah bermanfaat bagi tubuh, kalsium itu untuk tulang, magnesium itu sebenarnya obat mag. Sehingga kadar kalsium dan magnesium yang tinggi tidak masalah, mirip Aqua air mineral, kan malah air murni diberi mineral, ini sama. Jadi untuk industry aneka pangan 97% itu hanya itu yang mereka butuhkan tidak ada kadar kalsium dan magnesium. Namun, SNI untuk aneka pangan di Indonesia itu mensyaratkan itu dan sebenarnya ini hanya perlu untuk industry CAP. Jadi industry CAP itu akan menganggap kalsium dan magnesium itu racun bagi membrane dia, sehingga harus minim. Itu untuk industry yang tidak dimakan karena dia butuh unsur kimia natriumnya tidak butuh kalsium, tidak butuh magnesium.

Nah, ini sebenarnya yang menjadi kesulitan kita apabila kita diminta untuk bersaing dengan impor. Jadi mirip harga komoditas pangan yang lainnya Pak, seperti beras dan lain-lain pasti harga beras impor pasti murah juga kan gitu, ini sama kira-kira Pak.

Terima kasih Pak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Pertanyaannya kan belum dijawab tadi.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan, ijin Pimpinan, Pimpinan konkrit.

Saya pikir kita sekarang adalah hari untuk membahas tentang RKA K/L tahun 2020, 2021, dan 2022. Tidak usah dulu berpanjang kemana-mana, karena kita masih ada lagi penjabaran nanti di Rapat Dengar Pendapat dan sebagainya. Kita berikan kesempatan kepada Bapak Menteri untuk menjelaskan apa yang menjadi tema kita pada hari ini, sehingga kita selesai kemudian nanti akan kita masuk pada konteks-konteks yang lebih spesifik lagi.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Saya lanjutkan sedikit.

KETUA RAPAT:

Silakan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Untuk pertanyaan tadi ada pertanyaan soal dari WTP, 2019 WDP, dan kemudian menjadi WTP. Terus terang saya akan berusaha 2021 ini akan menjadi WTP. Kalau kenapa menjadi WDP barangkali Pak Irjen bisa membantu saya untuk menjelaskan terhadap hasil penilaian BPK.

Silakan Pak.

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI (Dr. MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.H.):

Terima kasih Pak Ketua, seijin Pak Menteri.

Ada 3 faktor penting Pak, yang membuat kami turun dari WTP menjadi WDP. Pertama, kasus OTT. Pada saat diskusi dengan pihak BPK karena nilai kerugian itu tidak besar 1% dari anggaran Pak, kalau Rp660 miliar baru kena Pak. Waktu diskusi mereka agak gamang bagaimana mungkin OTT tapi WTP, pas pucuk Pimpinan kena OTT Pak, ini panjang perdebatannya. Sampai Pak Sekjen datang ke BPK menjelaskan tidak ada uang APBN yang disalahgunakan, tidak ada ASN itu terlibat tapi mereka tetap gamang dengan penilaian publik Pak, itu satu.

Yang kedua, dicari lagi yang lainnya ditemukan di BLU tadi. BLU itu kan diberikan kepada nelayan Pak, pada saat pengembalian ada dua *account* pembayaran bunga dan *account* pembayaran utang pokok, itu masih *blended* Pak, sehingga BPK tidak bisa mengidentifikasi berapa keuntungan dari bunga dan berapa utang pokok Pak. Ini dijadikan juga temuan dari BPK.

Yang ketiga, tentang pungutan biaya tambat labuh di pelabuhan Pak. Menurut BPK bahwa akurasinya kurang Pak, sehingga kami sekarang turun kelapangan melakukan audit sebagai perpanjangan BPK, ini sebab kami WDP Pak. Jadi kalau APBN tidak ada, ASN juga tidak terlibat, tapi tadi kesan publik yang dijaga oleh BPK.

Terima kasih Pak.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Pak Kyai, sebentar.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Ansy.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Mohon maaf ini saya wakil rakyat dari NTT saya tidak mau kehilangan momentum soal garam ini. Saya baru buka di sini, ini Menteri Perdagangan ngomong Mendag sebut garam asal NTT bisa kurangi impor garam nasional. Ekstensifikasi garam NTT untuk ganti impor perlu didorong. Puluhan ribu ton garam NTT belum terjual. Kalau dari penjelasan teknis teknoratis Direktur Utama PT Garam sebenarnya tidak ada masalah soal lptek, soal pengintegrasian, *knowledge* tidak ada masalah. Lalu ini *lips service* atau apa, tipu, omong kosong atau apa. Karena kesimpulan saya justru kebijakan kita yang mematikan para petambak garam dan ini secara sistematis.

Nah, kalau ini PR-nya kita perlu juga memikirkan bagaimana kita berusaha untuk kemandirian dan kedaulatan kita dalam sektor pergaraman ini. Terus terang saya jujur mohon maaf Ibu Alien saya sebagai wakil rakyat dari NTT tidak mau kehilangan momentum ini, saya pakai momentum ini. Bapak di NTT di mana Pak? Di Polo Kabupaten Kupang. Ada di Malaka dan ada juga di Sabu Raijua Pak. Ya saya kasih tahu Pak, karena ini Menteri Dalam Negeri ngomong begitu, *sorry* Mendag Menteri Perdagangan ngomong begitu ini ada beberapa otoritas pejabat negara ngomong seperti itu, saya baru *searching* ini Pak. Saya minta atensi saja Pak, supaya jangan sampai habis ngomong tidak ada solusi kita.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Menteri.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Saya lanjutkan Pak, yang terakhir.

Ada 3 pertanyaan dari Bapak Ketua tadi dalam pidato, yaitu yang pertama upaya penyelamatan ABK WNI di kapal Cina terdampar di Mogadisu Somalia. Jadi berdasarkan informasi dari Kemenlu ABK WNI yang saat ini terdampar di Somalia bekerja pada Liao Dong Yu, perusahaan kapal ikan Cina

yang dengan durasi kontrak untuk 1 tahun, antara Desember 2019 hingga Desember 2020. Jumlah ABK WNI sebanyak 13 yang direkrut dan diberangkatkan oleh PT. Raja Crew Atlantik.

Selanjutnya hasil penelusuran oleh Kemlu pada Kementerian Ketenagakerjaan dan kementerian perijinan PT. RCA ini tidak tercatat sebagai perusahaan yang memiliki ijin untuk merekrut dan menempatkan ABT WNI untuk bekerja di kapal ikan berbendera asing melalui skema P to P (*Private to Private*). Sehingga kesulitan untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan tersebut bahkan tidak dapat dihubungi.

Berikutnya Kemenlu melalui Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia sedang menangani kasus ini bekerja sama dengan KBRI di Nairobi, KBRI di Beijing, dan kedutaan RRC di Jakarta. Saat ini sedang proses pemulangan, pihak perusahaan atau pemilik kapal sudah mengumpulkan para ABK WNI tersebut di satu kapal di dekat pesisir pantai.

Peran dan posisi KKP dalam tata kelola perekrutan dan penempatan ABK WNI untuk bekerja di kapal ikan berbendera asing dalam konteks hanya mendukung kementerian/lembaga terkait, yaitu Kemenhub, Kemenaker, Kemenlu, dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana solusi atas konflik ijin kapal Andon. Jawabannya KKP telah menerbitkan Permen KP Nomor 18 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengolahan perikanan NRI dan laut lepas, serta penataan Andon penangkapan ikan. Ini menjadi rujukan pengaturan teknis Andon penangkapan ikan untuk Pemerintah Daerah. Dengan adanya pengaturan teknis Andon penangkapan ikan diharapkan ke depan dapat terjalin hubungan yang harmonis antara Pemerintah daerah dan antar nelayan Andon, dan nelayan lokal. Karena Andon penangkapan ikan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antar gubernur untuk memuat unsur perikanan dan unsur kelautan.

Mekanismenya harus didahului dengan kesepakatan bersama antara gubernur dan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama penangkapan ikan oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk. Kemudian provinsi tujuan Andon memberikan persetujuan permintaan surat tanda penangkapan ikan Andon yang akan diterbitkan oleh provinsi asal. Dalam hal ini KKP akan memfasilitasi kesepakatan bersama antara gubernur dengan perjanjian kerja sama penangkapan ikan oleh kepala dinas terkait.

Yang ketiga, sejauhmana KKP memberikan kemudahan perijinan kapal perikanan di atas 30 GT untuk didorong melakukan penangkapan ikan di ZEE dalam rangka kebangkitan kelautan perikanan Indonesia. Dalam rangka memberikan kemudahan ijin kapal perikanan di atas 30 GT, KKP telah memiliki system informasi layanan cepat atau SILAT. Melalui system ini pelaku usaha dapat mengajukan permohonan selama 24 jam dan KKP juga membuka loket penerimaan dokumen secara online secara 24 jam dan prosesnya pada hari kerja.

Untuk mendorong kebangkitan kelautan perikanan Indonesia, KKP akan menerapkan kebijakan penangkapan terukur. Yang tadi saya sampaikan untuk kemudian kita akan melaksanakan rapat koordinasi atau FGD. Yang merupakan model implementasi ekonomi yang ditargetkan mampu menciptakan distribusi kebutuhan di wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Hal ini juga akan mendorong pengelolaan yang lebih tertata untuk kesehatan laut. Kebijakan penangkapan di setiap WPP dibuat agar pengelolaan sumber daya perikanan dapat mengukur, yang pertama angka produksi dan batasan penangkapan yang menunjukkan ketahanan ekosistem untuk mendukung ketahanan pangan. Yang kedua, nilai produksi yang menunjukkan ketahanan ekonomi. Dan yang ketiga, nilai pendapatan dan kesejahteraan nelayan yang memiliki ketahanan sosial ekonomi.

Pengaturan yang diterapkan pada kebijakan penangkapan terukur akan memanfaatkan teknologi pengawasan yang terintegrasi, mengikuti pengaturan area penangkapan ikan, jumlah ikan yang ditangkap, jumlah dan ukuran kapal yang dapat melakukan penangkapan, jenis alat tangkap yang diperbolehkan, dan pelabuhan tempat pendaratan ikan yang ditetapkan.

Nah, saat ini KKP sedang menyiapkan rencana detail kebijakan penangkapan terukur di 4 zona, yaitu WPP 711 Laut Natuna Utara, WPP 715, dan 718 Maluku dan Arafura, WPP 716, 717 Sulawesi Utara dan Pasifik Utara, WPP 572, 573 Samudera Hindia. Sedangkan WPP 571, 712, 713 adalah *free zone* dan WPP 714 adalah *spawning ground*.

Demikian yang dapat kami sampaikan semoga bisa menjawab.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS., M.Sc.):

Ketua, ada satu lagi legalitas tanah Pak, yang sekarang jadi masalah.

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):

Ijin Ketua sedikit, Pak Ketua kiri.

Pak Menteri, belum jawab itu yang 32 nelayan dari Aceh Timur sampai hari ini di Thailand itu belum dijawab Ketua.

KETUA RAPAT:

Termasuk iuran sekolah Rp4 juta sampai Rp6 juta.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Pak Ketua, sedikit boleh.

Yang menyangkut dengan yang dijelaskan oleh Pak Irjen tadi.

KETUA RAPAT:

Sebentar dulu, satu-satu biar Pak Menterinya nggak bingung. Yang pertama ada 32 nelayan Aceh, legalitas tanah, yang ketiga soal uang seragam, yang keempat soal WTP.

Silakan Pak TA.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sebentar dulu Pak Menteri biar Pak TA Khalid dulu.

F-GERINDRA (Ir. H. T.A. KHALID, M.M.):

Memang kondisi salah satu penjelasan yang diberikan oleh Pak Irjen tadi yang menyebabkan kita WDP dari WTP adalah tata kelola salah satu, juga kalau OTT kita tidak bisa *me-recovery* karena memang itu sudah kejadian. Tapi salah satu yang kedua yang masih bisa *recovery* yang masih bisa kita perbaiki bahwa menyangkut pengelolaan BLU atau KUR di LPMUKP. Maka ini mohon ijin Pak Menteri, di samping memang tidak profesional cara pengelolaan dan malah banyak di Aceh orang yang telah diverifikasi, malah telah sampai ke komite tapi tidak terealisasi, ini fatal ini kejadian. Pertama masyarakat Aceh yang telah mengajukan, telah diverifikasi, telah dikomite tetapi tidak keluar, malah pengolahan anggaran saja nggak benar. Cek punya cek beliau mohon maaf saya bukan kepada pribadi ini kita butuh orang-orang profesional di sini. Jangan gara-gara satu BLU ini kita nggak dapat WTP, ini mohon perhatian dan dievaluasi betul itu Pak Menteri.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Silakan Pak Menteri, 4 hal tadi biar cepat saya simpulkan ini.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Yang keempat saya janji Pak, ini saya selesaikan. Yang selanjutnya Pak Sekjen.

KETUA RAPAT:

Yang 32 tadi.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Pak Ketua, Wakil Ketua.

Kami akan mencoba menjawab yang 32, saat ini kebetulan kemarin masih di PSDKP kami selalu kordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, karena jalur diplomasi harus melalui Kementerian Luar Negeri Pak. Namun begitu, nanti akan bisa kami intensifkan kembali kordinasinya agar bisa dikembalikan yang 32 nelayan kita ke tanah air.

Terima kasih Pak.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Perlakuannya sama dengan yang tadi yang Somalia Pak. Pak Direktur Jenderal Tangkap tolong dijawab pertanyaan dari Ibu Endang.

DIRJEN PERIKANAN TANGKAP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI (Dr. Ir. MUHAMMAD ZAINI HANAFI, M.Si.):

Terima kasih Pak Menteri.

Terkait dengan tanah yang ada di Cianjur Selatan Ibu ya. Jadi memang ini adalah bukan perebutan, jadi tanah TNI kemudian sudah lama ditempati oleh masyarakat, kemudian sekarang dimiliki oleh masyarakat. Oleh karenanya, karena ini adalah menyangkut masalah hak atas tanah yang diklaim oleh masyarakat ini mungkin yang paling tepat adalah dengan Pemerintah Daerah yang harus menyelesaikan, karena kami tidak punya akses untuk menyelesaikan berkaitan dengan sengketa tanah ini. Tetapi kalau misalkan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki oleh nelayan yang tidak bersengketa kami ada program untuk segera menyelesaikan sertifikat-sertifikat yang memang itu termasuk pada program kami dalam bentuk sehat nelayan. Jadi kami memang ada program untuk sehat nelayan itu Ibu, ini sama.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc.):

Saya memperjuangkan yang nelayan Pak.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ibu Endang kalau mau ngomong harus pakai Pimpinan. Kita harus pakai Tatib ya Ibu Endang ya.

KETUA RAPAT:

Sudah *clear* tadi, yang iuran seragam Pak, BRSDM siapa sekarang kepalanya? oh, masih BLT silakan Ibu. Silakan, saya bantu menjawab sedikit karena saya pernah kunjungan kerja ke salah satu lembaga pendidikan di Surabaya. Memang gratis itu tidak tis, tis, jadi ada partisipasi antara Rp4 juta

sampai Rp6 juta untuk seragam awal. Gratisnya itu biaya proses pendidikan dan makan, jadi kalau urusan sepatu dan lain sebagainya itu ada partisipasi. Silakan ada dasarnya dari.

KEPALA PUSAT PENYULUH KELAUTAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Baik, terima kasih.
Mohon ijin Bapak Menteri, Bapak Sekjen.
Jadi pada dasarnya untuk nelayan yang memang direkomendasikan Bapak, itu dibantu dari APBN jadi tidak ada membayar untuk seragam.
Demikian.

KETUA RAPAT:

Seragam gratis?

KEPALA PUSAT PENYULUH KELAUTAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Gratis untuk nelayan-nelayan yang direkomendasikan.

KETUA RAPAT:

Awal?

KEPALA PUSAT PENYULUH KELAUTAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Iya.

KETUA RAPAT:

Itu ada persoalan di NTT coba.

KEPALA PUSAT PENYULUH KELAUTAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Siap Bapak.

KETUA RAPAT:

Termasuk saya kunjungan penjelasan dari Rektornya.

KEPALA PUSAT PENYULUH KELAUTAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Baik, nanti kami akan cek.

KETUA RAPAT:

Di Sidoarjo ya bu ya.

KEPALA PUSAT PENYULUH KELAUTAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Kalau pun ini terjadi ini adalah oknum Pak, yang mungkin memanfaatkan.

KETUA RAPAT;

Dan saya mohon ada prioritas ibu, rekomendasi karena itu bagian dari kesimpulan ada rekomendasinya Pak Ansy termasuk saya, WA ke Ibu nomor ujian itu karena komitmen dahulu kan setiap anak nelayan menjadi prioritas apalagi direkomendasikan oleh seluruh Anggota yang terhormat.

Terima kasih Ibu.

KEPALA PUSAT PENYULUH KELAUTAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Terima kasih Pak.

Selesai ini kami akan sampaikan laporannya Pak.

KETUA RAPAT:

NTT diselesaikan.

KEPALA PUSAT PENYULUH KELAUTAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Baik, siap Bapak.

KETUA RAPAT:

Kalau memang harus beli baju yang lain minta ke tokoh mudanya ini ambil dari uang reses-reses kan ada.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan, sebelah kanan ujung Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sudah *clear* dulu, sebentar dulu jangan topik yang lain dulu.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Nggak, ini konkrit sesuai dengan rapat kita sekarang.

KETUA RAPAT:

Ini persoalan yang aspirasinya teman-teman.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ya, saya paham Pak Ketua, tapi kebetulan di sini ada Ketua Komisi saya baru datang tadi ada rapat sebentar. Saya mau mempertanyakan, mempertegaskan anggaran 2021 yang difocusing yang belum ditandatangani oleh Pimpinan Komisi, ada apakah gerangan biar jelas ini barang. Rapat kita konkrit dan jelas. Terima kasih, karena orang Maluku apa adanya bukan ada apanya apa.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Aspirasi terhadap persoalan Dapil telah selesai ditanggapi oleh Pak Menteri melalui Tusinya masing-masing Eselon I. Sekarang hal ini karena kesimpulannya sudah saya buat ini.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pak Sudin tolong Pak Sudin Ketua.

Pak Suhardi sebentar kebetulan di situ ada Pak Sudin tolong dijelaskan karena ini kita bahas tentang anggaran 2021 juga ini.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Ibu Alien sudah selesai tadi persoalan.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Sudah, tapi ini ada Pimpinan di sini tolong,
Terima kasih.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Mungkin anda diluar sehingga tidak paham tadi.

KETUA RAPAT:

Tadi sudah ada klarifikasi dari Pak Menteri, sebenarnya kan sudah ada permohonan maaf dari Pak Menteri dan selanjutnya Pak Direktur Jenderal dan Sekjen komandannya telah didelegasikan tadi untuk menyelesaikan refocusing yang belum ada persetujuan dari seluruh Poksi dan Pimpinan Komisi IV DPR RI. Itu Ibu Alien, makanya jangan keluar masuk.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ingin saya jelaskan lagi saya mau dari Ketua Komisi yang ngomong juga, Pak Menteri sudah ngomong, Ketua Komisi juga harus ngomong biar kita nggak ada salah paham ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan, mau ngomong apa Pak Sudin.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Terima kasih.

Jadi gini, Menteri, Sekjen, serta Eselon I di Kementerian Pertanian itu setelah ada surat refocusing saya 3 kali konsultasi dengan Sekjen dan jajarannya tarik menarik. Ini dipotong ini nggak, ini dipotong ini nggak. Saya menjelaskan aspirasi Anggota saya jangan dipotong. Senin kamu pulang, Rabu dia datang lagi, “sudah Pak Ketua, sudah selesai”, sudah selesai gimana? sudah selesai sesuai dengan keinginan Anggota mengenai aspirasi. Boleh nggak saya minta tanda tangan refocusing yang ketiga, saya nggak mau, saya nggak tanda tangan. Saya akan tanda tangan apabila seluruh Eselon I rapat bahwa aspirasi Anggota Komisi IV DPR RI di Dapilnya yang mana sebagian besar CPCL-nya sudah masuk ada realisasi. Oke dia pulang lagi, Jum’at lah baru final, Jum’at datang jam 13.00 WIB setelah membawa seluruh aspirasi diparaf. Masing-masing Eselon I memparaf bahwa kalau kasih *hand tractor* untuk Pak H. Hasan Pimpinan Komisi IV DPR RI sekian, untuk Anggota sekian semua sama. Baru saya tanda tangan refocusing ketiga dan keempat.

Tetapi teman-teman ini bertanya pada saya pada groupnya, ini mengenai Bansosnya Komisi IV DPR RI bagaimana? Saya nggak tahu, refocusing ketiga saya nggak tahu, refocusing keempat saya nggak tahu, loh Pimpinan kok nggak tahu? Karena saya nggak tanda tangan. Sebetulnya yang salah ini bukannya Menteri, Pak Sekjen ini memang belum kata masalah kelautan yang salah itu karocannya, harusnya memberikan masukan kepada Sekjen. Pak Sekjen paling nggak ini harus dibahas dulu, ada kesepakatan, supaya jangan ada *miss* komunikasi. Itu saja Pimpinan, Ibu Alien, jadi saya tidak tanda tangan, jadi jangan seuzon lagi sama saya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Sudah cukup Bapak dan Ibu sekalian.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Sedikit Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oh iya, Pak Suhardi.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Ada pengadaan kapalun Sulawesi Barat tadi saya pertanyakan Direktur Jenderal Tangkap yang di Provinsi Sulawesi Barat itu tidak bisa dibelanjakan. Ini akibat aturan yang dibuat oleh Direktur Jenderal yang tidak jelas kata Dinas Perikananannya. Jadi saya minta ini menjadi perhatian Bapak supaya dalam waktu yang singkat ini bisa jalan itu anggaran, ada 9 unit kapal, CPCL-nya sudah siap.

Terima kasih Pimpinan.

F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Ketua, saya boleh bicara sedikit saja. Saya perlu ketegasan Pak Menteri saja.

KETUA RAPAT:

Silakan, jangan teknis ya karena mau disimpulkan.

F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Baik, satu menit, tugas saya kan cuma satu menit kata Pak Ketua.

Itu terkait dengan kebijakan DAK Pak, inikan sebenarnya di rapat kita ini, inikan sudah harus membahas dan menyimpulkan menu-menu saja, tadi saya sudah usulkan saya perlu keputusan Pak Menteri ini, nanti baru kita perdalam dipendalaman. Ada beberapa kegiatan yang kalau bersifat modeling saya setuju, tapi kalau kemudian berulang-ulang itu sebaiknya ada beberapa anggaran kita daerahkan saja Pak Menteri. Tadi sudah saya sebutkan beberapa rinciannya. Saya perlu ketegasan itu dari Pak Menteri, sehingga nanti pada saat pendalaman kita bisa kemudian menyisir mena saja daerah kita alokasikan ke daerah saja melalui DAK tapi ada juga yang belanja pusat. Perlu ketegasan itu Pak Menteri, sehingga kemudian kesimpulan nanti akan mengikat sehingga pada saat kita pendalaman kita coba nanti eksplorasi lebih jauh.

Gitu Pak Menteri, terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Silakan tanggapi yang terakhir ini Pak, untuk saya bacakan kesimpulannya.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Terima kasih Pak Ichsan masukannya.

Saya kira nanti kita perlu konsultasi langsung, jangan sampai nanti kalau ... kemudian turun ke bawah, kami kemudian di kementerian belum bisa ngapa-ngapain. Sebaiknya jangan begitulah, yang sudah dialokasikan di sana sudah sinkron. Nanti kita konsultasi, kita berdebat dalam satu konsultasi yang bukan di Rapat Kerja maksud saya. Dalam satu konsultasi khusus supaya lebih hidup, lebih mendalam, kalau di Rapat Kerja ini direkam gitu jadi kurang bebas bicara, gitu Pak Ichsan. Nanti karena supaya masukan Pak Ichsan ini bisa kita, tapi pada prinsipnya sebetulnya saya kan bisa memahami. Namun demikian kita lihat dulu dalam prosesnya. Saya kira demikian Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah menyampaikan jawabannya. Hal yang belum sampai dengan hal yang teknis kita ada mekanisme Rapat Dengar Pendapat dan FGD sebagaimana komitmen yang telah disampaikan langsung oleh Bapak menteri Kelautan dan Perikanan.

Dari dialog, diskusi, saran, dan masukan Anggota Komisi IV DPR RI sebelum acara kita akhiri akan kami bacakan rancangan kesimpulan Rapat Kerja pada hari ini. Kami persilakan Ibu Anggia untuk menyampaikannya.

KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Baik, terima kasih.

Bapak, Ibu, Pimpinan, dan Bapak Menteri, dan semua jajaran.

Saya bacakan rancangan kesimpulan rapat kali ini.

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2020 per 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Ini sudah diaudited jadi saya tidak perlu membacakan secara detail ya, karena ini sudah diaudit. Point pertama dilihat terus ke bawah terus saja karena ini sudah diaudit. Pak Sekjen dilihat angkanya juga, terus sampai D.

Setuju Bapak dan Ibu?

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan realisasi penyerapan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2021 berdasarkan *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) per 19 Agustus 2021 sebesar Rp2.675.528.373.590,- (dua triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) atau sebesar 56,36%. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen melakukan optimalisasi penyerapan anggaran tahun 2021 agar lebih tinggi dari tahun 2020 sebesar 91,27%.

Sehingga dapat meraih opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terutama bantuan Pemerintah.

Para Anggota?
Pak Menteri ada.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Yang terutama bantuan Pemerintah itu jangan, WTP saja.

KETUA RAPAT:

Usulan dari Pak Menteri terutama bantuan Pemerintah tidak perlu ditulis.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Iya.

KETUA RAPAT:

Baik.
Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RKAK/L Tahun 2022 sebesar Rp6.115.967.397.000,- (enam triliun seratus lima belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan surat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan RI Nomor S-634/MK.02/2021 dan 516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 pada tanggal 23 juli 2021 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menentukan rincian alokasi dan program masing-masing Eselon I pada Rapat Dengar Pendapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anggota?
Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Ternyata setelah COVID itu membaca *menggeh-menggeh* juga ya.

4. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai usulan anggaran tambahan tahun 2022 Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp8.043.438.587.000,- (delapan triliun empat puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Para Anggota?

F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Ketua, ijin Ketua.

Di point 4 ini memang tidak hanya dari KKP kita bergerak, tapi teman-teman Banggar kita juga bergerak juga di point 4 ini untuk memperjuangkan.

KETUA RAPAT:

Ini konsekuensinya semua kan.

F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Iya mengingatkan itu saja.

KETUA RAPAT:

Oke.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai Pagu Indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 sebesar Rp1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar rupiah) dengan rincian:
 - a. DAK Provinsi sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah); dan
 - b. DAK Kabupaten/Kota sebesar Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar rupiah).

Selanjutnya Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai usulan tambahan anggaran DAK Tahun 2022 Kementerian Kelautan dan

Perikanan sebesar Rp1.800.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus miliar rupiah).

Para Anggota?

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Interupsi Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Hermanto, silakan Pak Hermanto.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Ini Ibu Ketua, kita tidak pernah menerima tentang sebenarnya implementasi DAK ini di daerah-daerah. Mungkin kita itu agak kerumitan untuk melakukan kontrol seperti apa, sehingga kita tidak tahu persis seperti juga evaluasi dan perkembangannya. Menurut saya ini harus ada juga catatan bahwa DAK inipun juga bisa dikontrol untuk dipantau.

KETUA RAPAT:

Usulan apa tadi kita sudah sempat bahas ya tentang DAK.
Pak Hermanto punya usulan?

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Usulan saya Anggota dapat melakukan pemantauan alokasi di daerah.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pimpinan.

Saya hanya menjelaskan tadi kalau memantau bagaimana mau memantau kalau penjelasannya saja belum ada. Ini kita hanya menerima penjelasan nanti waktu rapat dengan Eselon I kita mau pendalaman, kita mau monitor itu pada saat nanti. Ini sudah benar kata-katanya hanya menerima penjelasan bukan menyetujui.

Ya Ibu Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Ketua, ijin Ketua sekalian.

Menerima penjelasan itu juga kita baru menerima draft menu kan, artinya masih membuka ruang merubah menu yang ada, gitu ya. Itu yang

penting menerima penjelasan beserta dengan menunya. Penjelasan saja menunya nanti baru bisa kita koreksi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Hermanto oke?
Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyelesaikan petunjuk teknis (juknis) bantuan Pemerintah tahun 2022 di akhir tahun 2021 (T-1) dan segera melakukan sosialisasi bimbingan teknis (bimtek) kepada masyarakat kelautan perikanan bersama Anggota Komisi IV DPR R, agar awal tahun 2022 bantuan Pemerintah dapat terdistribusi dengan baik dan tepat sasaran. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu memperbaiki pola pengadaan barang dan jasa (PBJ) tahun 2022, misalnya dengan memakai konsep *e-catalog*, agar tercipta efisiensi biaya dan efisiensi waktu sehingga program pemulihan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan di masa pandemi COVID-19 dapat tersalurkan dengan cepat dan tidak terkesan lambat.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Ibu, mungkin jangan diawal tahun tetapi triwulan I 2022, karena awal itu tanggal 2 Januari, rasanya tidak mungkin.

KETUA RAPAT:

Para Anggota?
Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memprioritaskan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) kelompok

masyarakat yang sudah lolos verifikasi bantuan Pemerintah usulan aspirasi di tahun 2021, kemudian terkena *refocusing* anggaran agar dapat didahulukan diimplementasikan di tahun 2022 sehingga mampu memperbaiki tingkat kepercayaan publik.

Para Anggota?

Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyelesaikan keluhan nelayan perairan Pulau Bangka terutama Perairan Air Kantung, Perairan Pantai Matras, Perairan Pantai muntok, dan perairan lainnya akibat adanya kegiatan operasional Kapal Isap Produksi (KIP) yang dilakukan oleh mitra kerja PT Timah Tbk, serta perusahaan lainnya. Mengingat terbukti berdampak merusak lingkungan ekosistem perairan dan menghilangkan mata pencaharian masyarakat/nelayan sekitar.

Para Anggota?

Pak Menteri?

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pimpinan, interupsi.

KETUA RAPAT:

Pak Slamet.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Saya hadir sejak sidang dibuka sampai sekarang masih ada. Perasaan belum ada tadi ngobrol-ngobrol tentang itu mungkin ada penjelasan kenapa bisa muncul kesimpulan itu.

KETUA RAPAT:

Saya termasuk tanya tadi Kang Dedi yang.

F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDIN, M.Si./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Kang Dedi hasil kunjungan dan disuarakan oleh beliau.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri setuju ya?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pesan buat Pak Sekjen, Poldanya mohon dihubungi.

KETUA RAPAT:

Padahal suaranya Kang Dedi tadi lumayan menggelegar.

9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memanfaatkan bangkai kapal MV Viking Lagos di perairan Kabupaten Pangandaran agar ditarik ke pantai sebagai wisata edukasi masyarakat dan pendapatan daerah.

Para Anggota?
Pak Menteri?

F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDIN, M.Si./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pak Menteri, dari sisi anggaran mampu nggak.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Mohon maaf Pimpinan, kita kan kesimpulan ini harus konkrit. Kalau memang sudah setuju harus dilaksanakan, kalau tidak digantung. Jadi jangan kita di sini asal kesimpulan setuju-setuju tapi tidak diimplementasi.

Terima kasih.

F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDIN, M.Si./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ini menyangkut anggaran juga kalau nggak ada anggarannya jangan Pak Menteri. Iya, anggarannya ada nggak?

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Pak Ketua.

F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDIN, M.Si./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Sebentar dulu biar sepakat, tidak harus tahun ini kan. Maksud saya kalau tidak termasuk yang dianggarkan tidak usah kita masukkan dulu kan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Pak Ketua.

Sepertinya kalau saya membaca apa yang bahasa *body* Pak Menteri, Pak Menteri ini ragu-ragu. Jadi kalau ragu-ragu ya kita batalkan saja, tapi baiknya kalau memang ada anggarannya, anggarannya dialokasikan saja untuk mengatasi dampak COVID-19.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.
Pak Menteri gimana.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pimpinan, ini masukan dari saya. Masukan dari saya inikan masih pandemi COVID-19 kalau bicara untuk edukasi, wisata atau apa, kan bisa Menteri bikin surat kepada Menteri Pariwisata bahwa ini ada suatu tempat yang bisa dimanfaatkan untuk edukasi wisata. Kalau koordinasi percuma, kalau menterinya bikin surat nanti suratnya kita lihat betul nggak menterinya bikin surat, kan gitu saja ya Pak Menteri.

F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Saya pikir masukin saja, persoalan apakah dialokasikan atau tidak, tidak ada soal yang penting ada ikhtiar. Pak Menteri bisa dengan Menteri Pariwisata.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Kalau koordinasi sangat bisa.

Cuma saya lagi mikir dari tadi yang nomor 8 saya sudah bilang setuju tapi agak mikir tapi ya sudahlah. Nomor 8 di anu dong, karena ijinnya itu bukan ada di kita, ijinnya itu ada di ESDM dan daerah. Ini nanti saya khawatir, mungkin bahasanya dicarikan yang tepat karena kalau kita harus menyelesaikan bisa nggak selesai-selesai itu.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pimpinan, bisa ngomong. Mendingan gini kita adakan rapat gabungan dari Kelautan PSDKP, dari SDM-nya bagian eksplorasi dan dari KLHK-nya lingkungan hidup. Kita rapat gabungan, kita rumuskan karena apa? Ini yang namanya PT Timah inikan perusahaan yang nggak benar. Menjual kavling kepada orang lain untuk diisap pasir timahnya. Mereka tidakpunya jiwa

nasionalis yang dipikirkan cuma keuntungan cari duit saja gitu saja. PT-nya rugi.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Bagaimana kalau begini Pak, Menteri Kelautan dan Perikanan untuk berkoordinasi dengan tadi ESDM dan KLHK untuk menyelesaikan keluhan nelayan. Nanti kemudian kita akan lihat lagi di Undang-Undang CK dan sebagainya. Sebetulnya kalau kita bicara soal ruang laut ya memang di kita cuma itu diterbitkan sebelumnya.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Ijin Ibu Ketua.

KETUA RAPAT:

Oke, Pak Hermanto.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Terkait dengan usulan Pak Menteri dan juga Pak Sudin tadi. Jadi ini harus difasilitasi oleh Komisi IV DPR RI, yaitu mengadakan rapat gabungan. Supaya nanti Pak Menteri nggak, gitu loh. Jadi yang memfasilitasi rapat gabungan Komisi IV DPR RI dengan menghadirkan menteri-menteri ini.

Demikian Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya Pak Doktor.

F-PDIP (SUDIN, S.E./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ibu Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Kan tadi sudah saya katakan nanti kalau menterinya kan nggak mungkin kita undang Menteri ESDM, biasanya mereka mengutus Eselon I. Yang dari LHK itu Ibu Vivien kita undang, dari ini mungkin PSDKP dan pulau-pulau kecil untuk mengawasi. Karena di Bangka ini saya dari awal masuk ini sampai hari ini nggak ada habisnya, karena apa? Mohon maaf mereka *backing*-nya terlalu kuat. Oknum-oknum dari berbagai pihak pun banyak *backing* di sana, karena ini harta karun yang tinggal diambil di laut. Itu Ibu Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, Bapak dan Ibu.

Jadi atas usulan dari, masukan dari Ketua dan Bapak, Ibu sekalian, dan juga termasuk masukan dari Pak Menteri. Jadi bahasanya untuk point 8 berkordinasi dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup nanti yang diutus untuk berdiskusi adalah yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua. Begitu ya bungkus 8 dan 9, ayo 9 mas, 9 tadi sudah. Oke, sekarang 10. Oke, kita ke point 10.

10. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pendangkalan sedimentasi muara sungai di beberapa daerah Indonesia agar akses keluar masuk kapal nelayan tradisional di pelabuhan perikanan dapat berjalan dengan lancar, termasuk perbaikan infrastruktur pelabuhan perikanan.

Para Anggota?
Pak Menteri?

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ibu Ketua, sedikit saya tambahkan. Dulu Zaini ini masih Plt Direktur Jenderal Tangkap, sama Edhy Prabowo ke Lampung cuap-cuap akan diperbaiki saluran irigasi saluran airnya, akan diperbaiki pelabuhan perikanan. *Alhamdulillah* sampai hari ini perencanaannya pun nggak ada. Itu saya ingatkan anda Zaini ya, waktu itu anda ke Pelabuhan Maringgai kan. Itu bukan Daerah Pemilihan saya tapi waktu itu kebetulan saya ikut kesana. Itu saya ingatkan loh 2022 harus masuk itu.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Ibu Ketua, usul Ibu Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.
Yang mana?

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Point 10 tadi ya, ini terlalu umum harus diberikan batas waktu, mau diperbaiki sampai kapan. Apakah akan kita anggarkan di 2022 misalnya.

KETUA RAPAT:

Usulannya.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Sehingga misalnya kalau kita sudah taruh tahunnya berarti nanti dalam penambahan anggaran Rp8 triliun itu harus dianggarkan soal perbaikan infrastruktur perikanan ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Berarti ini sudah harus ada perencanaan. Sepakat?

(RAPAT: SETUJU)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Mungkin tambahin dulu tahun anggaran 2022.

KETUA RAPAT:

Baik.

Bapak dan Ibu kita ke point 11.

11. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memfasilitasi bantuan Pemerintah kepada petambak garam rakyat dengan teknologi terkini, guna meningkatkan mutu dan kualitas agar dapat diserap oleh industri sebagai bahan baku dan bahan penolong lainnya sehingga untuk mengurangi impor garam.

Para Anggota?

Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Siapa yang belum setuju?

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Saya Ibu Ketua.

KETUA RAPAT:

Kok nggak ngomong.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Dari tadi nggak dikasih ngomong.

Kalau kesimpulan seperti ini, inikan bukan itu persoalannya seperti disampaikan oleh Pak Direktur PT Garam. Jadi bukan persoalan teknologinya, mereka sudah siap. Persoalannya bahwa mereka itu tidak diserap. Kenapa tidak diserap? Karena kalah harga dengan garam impor, jadi bukan pada teknologi persoalannya. Begitu Ibu Ketua.

KETUA RAPAT:

Ada usulan nggak, tadi sempat dibahas tentang teknologi juga seingat saya ya, kita juga bahas tentang teknologi.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Dinamikanya seperti itu tapi ditanggapi oleh PT. Garam bukan itu persoalannya. Jangan sampai kita memberikan sesuatu yang tidak memberikan solusi.

KETUA RAPAT:

Oke, ada usulan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Ibu Ketua, usulan saya digabung saja artinya ada teknologinya ada juga penyerapan, Pemerintah menyerap.

KETUA RAPAT:

Konkrit usulannya bagaimana Pak Doktor.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Pemerintah kepada petambak garam rakyat dengan teknologi ini meningkatkan mutu kualitas dan Pemerintah menyerap atau membeli atau Pemerintah menjamin garam rakyat itu dapat terserap.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Tolong dimatikan mic-nya Pak Hermanto.

Jadi gini, inikan persoalannya adalah bukan persoalan harga yang jatuh tetapi biaya angkut yang sangat mahal. Dari NTB, dari NTT ke Pulau Jawa itu 1:3 impor garam dari Australia, masalah angkutnya yang mahal, transportasinya. Sama juga dengan sapi dari NTT yang periode lalu Menteri Pertanian membeli kapal angkut sapi. Satu kapal isinya 500 kalau belum penuh sapinya belum berangkat, betul Pak Johan? Kalau belum penuh belum berangkat. Kalau berangkat sampai ke Jakarta balik kesana kosong. Sama

juga kalau kapal angkut sapi dari Australia ke Jakarta minimal 25.000 ekor jadi jauh lebih murah 1:3 juga harganya. Inikan persoalan di ongkos angkutnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Ibu Ketua, tadi Pak Ketua bicara tentang nasionalisme, tentu ini sesuai dengan cara pandang. Jadi kalau kita mau adu harga antara harga garam rakyat dengan impor itu tetap pilihannya impor. Kan persoalannya sampai kapan, kan kita mengimpor seharusnya hal-hal yang tidak bisa diproduksi oleh dalam negeri kita. Kalau kita adu harga antara petani petambak garam kita dengan impor Pak, waduh selalu kalah, terus negara di mana, nasionalis kita di mana, kan di situ persoalannya Ketua. Kalau kita mau enak tidak usah kita produksi biar kita nggak ada uang keluar, kita beli saja, bagi sudah kita kuota masing-masing biar kita impor. Itu Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya pikir kalau semangat untuk nasionalisme sama ya bahwa kita punya semangat untuk mengurangi impor garam, kita sudah sepakat itu ya Bapak dan Ibu. Tinggal kemudian yang di sini inikan diangkat adalah tentang teknologi dan kemudian tentang kualitas. Tadi ada masukan untuk penyerapan, bagaimana kalau dimasukkan tentang penyerapan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Ibu Ketua.

KETUA RAPAT:

Sedikit saja karena Pak Menteri belum Sholat Dzuhur.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Atau *break* dulu.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Break dulu baru balik lagi.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Sholat waktu sudah mau habis, Pak Hasan juga belum sholat. Setuju di-*break*.

KETUA RAPAT:

Silakan Kakak Ansy.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Saya ngomong cepat saja ini berangkat dari diskusi kita tadi dengan Direktur Utama PT Garam. Menurut saya peran Pemerintah itu dua, satu adalah memfasilitasi bantuan Pemerintah kepada petambak garam rakyat berupa teknologi sehingga garam yang dihasilkan itu berkualitas dan idealnya bisa diserap di pasar itu satu. Yang kedua, menurut saya kalau kita bicara impor itu solusinya tidak ada di kita sini, karena itu kebijakan negara di Kementerian Perdagangan ataupun Kementerian Perindustrian mungkin terkait dengan hambatan impor.

Oke serapan kalau misalnya Pemerintah membeli garam pertanyaan saya terus garam itu mau Pemerintah bagi ke siapa? Ke Pegawai Negeri, TNI/Polri atau kemana. Nah, inikan pertanyaan. Menurut saya Pemerintah itu perannya cuma dua, satu meningkatkan kualitas didorong tadi oleh PT Garam dan bila dikatakan mampu supaya bisa bersaing. Yang kedua, buat kebijakan supaya garam masuk ke dalam negeri itu bukan Rp0 harus ada apa istilahnya ya proteksi, harus ada itu.

KETUA RAPAT:

Pajaknya ditinggiin.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Ya, tapi kalau dibilang mau diserap Pemerintah beli, saya mau tanya Pemerintah beli terus mau bagi kesiapa, Anggota DPR? *Sorry*, konkrit saja Ibu Ketua, point 11 itu disetujui atau tidak.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Kalau saya setuju yang begini sebenarnya, karena apa pun namanya tugasnya Kementerian Kelautan dan Perikanan kan membangun produksi dengan kualitas yang baik. Soal nanti kemudian impor atau tidak impor itu ada kementerian lain yang berkepentingan soal itu karena itu *policy*-nya.

KETUA RAPAT:

Baik, Bapak dan Ibu 11 seperti itu ya.
Baik, terima kasih.
Sekarang point 12.

12. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangkitkan aset infrastruktur yang mangkrak di beberapa daerah di Indonesia agar menciptakan bisnis industry kelautan dan perikanan yang mampu menyejahterakan rakyat dengan mengoptimalkan

pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Bapak dan Ibu?
Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih.

13. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaporkan status kepegawaian bagi peneliti beserta status aset di Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan merujuk terbentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Para Anggota?
Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

14. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengevaluasi adanya pungutan biaya seragam di Sekolah Politeknik binaan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan jika ada pelanggaran oleh oknum tertentu maka perlu ditindak oleh Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Para Anggota?
Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

15. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait komoditas perikanan dan komoditas udang bersama Komisi IV DPR RI. Para Anggota?

F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Ketua ijin, ijin Ketua.

Sepengetahuan saya, saya ikut rapat di sini hanya kita bicara *shrimp estate*, perikanan rasanya belum ada tadi kita bahas.

KETUA RAPAT:

Ada kok.

F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Nggak, saya mau tanya saja dulu itu.

KETUA RAPAT:

Saya meluruskan juga tadi sempat dibicarakan kok tentang perikanan. Setuju Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih.
Silakan Mas Kyai Hasan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Ibu Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Johan jangan patah hati dong.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Bukan, saya gampang kita cari yang lain kalau model gitu apalagi masih ada Kang Dedi aman itu. Nah, kita bicara dari tadi soal refocusing dan kita meminta tadi ketegasan. Saya minta tadi itu kepada Pimpinan agar dijadikan, bagaimana sih status refocusing yang itu. Nah, justru yang tidak kita bicarakan

yang banyak masuk kesitu. Ya refocusing bagaimana statusnya apakah di forum ini kita legalkan itu refocusing atau tidak.

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDIN, M.Si.):

Belum, nanti kan ada Rakor.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Nggak dimasukkan ke kesimpulan?

KETUA RAPAT:

Sudah ada komitmen, sudah dijadwal sama Pimpinan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Boleh saya perjelas, mungkin yang dimaksud Pak Johan tadi karena Pak Menteri sudah bilang siap untuk kita bicara lagi. Maksud Pak Johan itu adalah itu masuk dalam kesimpulan, begitu maksudnya.

KETUA RAPAT:

Sudah kita komitmen untuk dijadwalkan nggak usah disimpulkan kan, tinggal ngomong kapan kan begitu.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Sebelum kami menutup Rapat Kerja ini kami persilakan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan kata penutup dalam Rapat Kerja hari ini.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI.

Terima kasih atas segala masukan yang membangun untuk kemudian kita segera menjalankan. Tapi saya tentu sangat berterima kasih komunikasi ini dan saya yakin ke depan selalu ada yang salah, ada yang tidak baik untuk kemudian kita koreksi.

Demikian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah Rapat Kerja pada hari ini. Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI mohon maaf, apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan, kekhilafan. Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabil'amin* Rapat Kerja ini kami tutup.

*Wallahu Muwafiq Ila Aqwamith Thariq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.30 WIB)

Jakarta, 23 Agustus 2021
a.n. KETUA RAPAT
Sekretaris Rapat

Ttd.

Drs. Achmad Agus Tommy
NIP. 196508171988031002